

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DESA TAULO KEC. ALLA KAB. ENREKANG



PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
 PENYANDANG DISABILITAS DI DESA TAULO
 KEC. ALLA KAB. ENREKANG**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITAS DI DESA TAULO
KEC. ALLA KAB. ENREKANG**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Program Studi

Pengembangan Masyarakat Islam

Disusun dan diajukan oleh

**USWAHTUN HASANA
NIM: 2120203870231004**

Kepada

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Uswahtun Hasana

Nomor Induk Mahasiswa : 21202038702321004

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

B-1092/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Afidatul Asmar, M.Sos. (*Afidatul Asmar*)
NIP : 1991032620901005

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Uswahtun Hasana

Nomor Induk Mahasiswa : 21202038702321004

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
B-1092/In.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2024

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Afidatul Asmar, M.Sos.	(Ketua)
Andi Nurul Mutmainnah, M.Si.	(Anggota)
Selvy Anggriani Syarif, M.Si.	(Anggota)

(Afidatul Asmar)
.....
(Andi Nurul Mutmainnah)
.....
(Selvy Anggriani Syarif)
.....

Mengetahui:
Dekan
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



KATA PENGANTAR

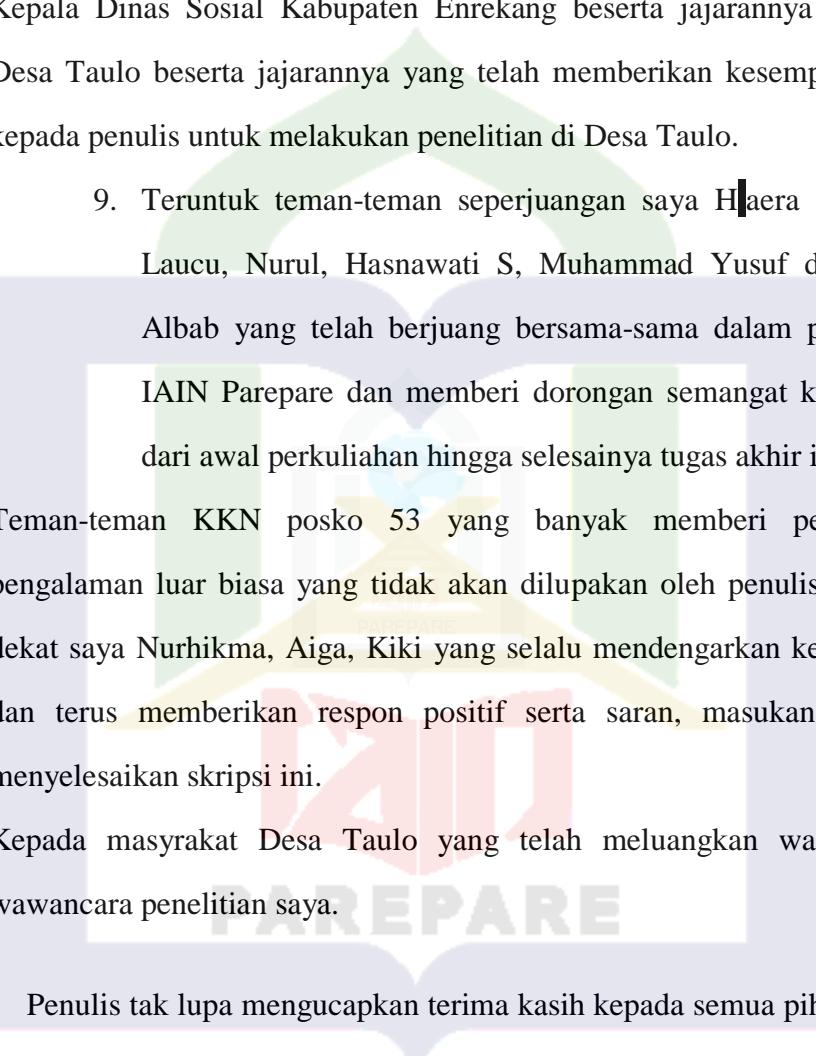
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبٰياءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلٰى آلِهٖ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Taulo Kec. Alla Kab. Enrekang”. Salam dan Salawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pemberi petunjuk jalan yang lurus. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghantarkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua , Ayahanda Tasryf sebagai panutanku, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjan. Pintu surgaku, Ibu Hadasia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan serta doa yang teramat tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Kepada saudara-saudari penulis Muh. Aghny Ayyub, Muh. Adnan Buyung, Muqrina serta ipar dan keponakanku, terimah kasih telah memberikan dukungan serta doa agar penulis terus semangat dan menyelesaikan perkuliahan. Gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimah kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr.A.Nurkidam, M.Hum. Sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Afidatul Asmar, M. Sos. Sebagai ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Sekaligus sebagai dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak Haramain, M. Sos. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi dan dukungan serta bantuan dalam menjalankan aktivitas akademik.
5. Ibu A. Nurul Mutmainnah, M.Si. dan Ibu Selvy Anggriani Syarif, M.Si. Selaku dosen Penguji I dan II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membagi ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan di IAIN Parepare.

- 
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang nyaman serta menyediakan referensi yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Enrekang beserta jajarannya serta Kepala Desa Taulo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Taulo.
 9. Teruntuk teman-teman seperjuangan saya H. Hera Pasera, Wasti Laucu, Nurul, Hasnawati S, Muhammad Yusuf dan S.M. Ulil Albab yang telah berjuang bersama-sama dalam perkuliahan di IAIN Parepare dan memberi dorongan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini.
 10. Teman-teman KKN posko 53 yang banyak memberi pelajaran serta pengalaman luar biasa yang tidak akan dilupakan oleh penulis. Serta teman dekat saya Nurhikma, Aiga, Kiki yang selalu mendengarkan keluhan penulis dan terus memberikan respon positif serta saran, masukan untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
 11. Kepada masyarakat Desa Taulo yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara penelitian saya.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajian sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uswahtun Hasana
NIM : 2120203870231004
Tempat/Tanggal Lahir : Malele, 07 September 2002
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan
Penyandang Disabilitas Di Desa Taulo Kec. Alla Kab.
Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juli 2025
Penulis,



Uswahtun Hasana
NIM. 2120203870231004

ABSTRAK

Uswahtun Hasana, Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Taulo Kec. Alla Kab. Enrekang (Dibimbing oleh Afidatul Asmar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan pemerintah desa terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Taulo Kec. Alla Kab. Enrekang dan untuk mengetahui hasil pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Taulo Kec. Alla Kab. Enrekang. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu secara teoritis dan secara praktis terhadap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan aksesibilitas, pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang lebih mudah dijangkau, pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara kepada 14 narasumber yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Dinas Sosial, penyandang disabilitas dan masyarakat Desa Taulo. Teknik analisis data menggunakan data reduksi, data penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini mengkaji peran pemerintah Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Fokus utama adalah menganalisis bentuk dan hasil pemberdayaan yang dilakukan, termasuk perencanaan program, alokasi dana, dan implementasi kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa secara aktif mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas melalui survei dan wawancara, merancang program inklusif seperti perbaikan aksesibilitas Puskesmas Pembantu (Pustu), penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan pelatihan keterampilan seperti cukur rambut. Program-program ini terbukti meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas, serta berkontribusi pada pengurangan stigma negatif di masyarakat.

Meskipun terdapat komitmen kuat, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan stigma sosial yang masih ada. Namun, melalui pendekatan partisipatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, program pemberdayaan ini berhasil menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program sangat penting untuk mencapai dampak positif yang signifikan dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

Kata kunci: *Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Hasil	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Landasan Teoritis	13
1. Peran	13
2. Pemerintahan	15
3. Pemberdayaan.....	18
C. Kerangka Konseptual	21
D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27

A. Jenis dan pendekatan penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Pemberdayaan Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.....	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
4.1	Rekap Data Penyandang Disabilitas Tahun 2024 Dinas Sosial Kab. Enrekang	35
4.2	Rekap Data Penyandang Disabilitas Tahun 2024 Desa Taulo Kec. Alla Kab. Enrekang	37

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Fikir	23
4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Taulo Kec Alla, Kab Enrekang	35



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	79
2	Permohonan Izin Meneliti	82
3	Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penenaman Modal	83
4	Surat Selesai Meneliti	84
5	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	85
6	Surat Keterangan Wawancara	86
7	Dokumentasi	96
8	Turnitin	99
9	Biodata Penulis	100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ڙ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ڙ	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ڙ	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

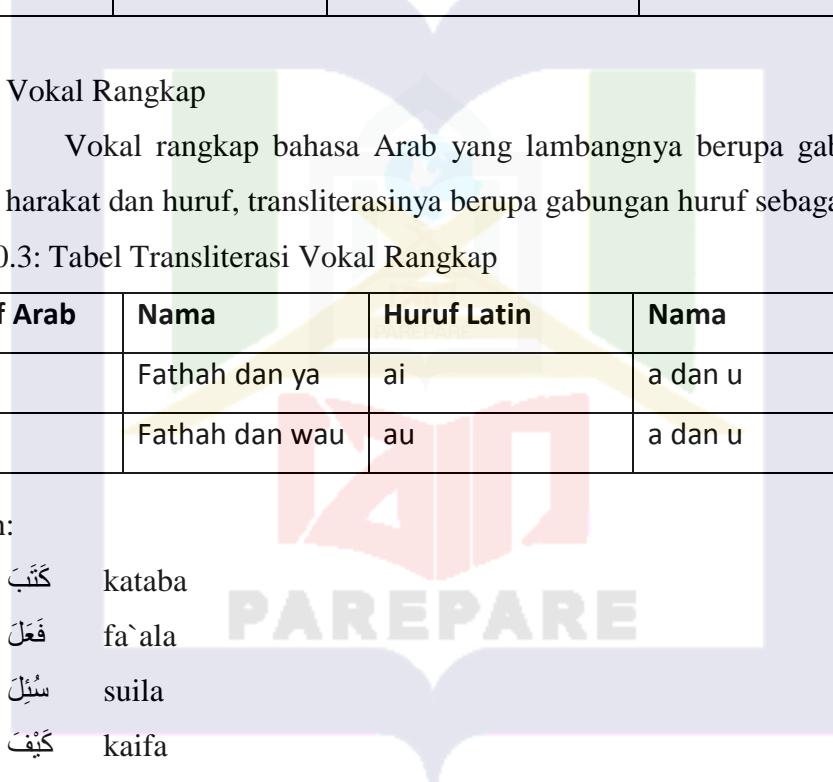
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama



□	Fathah	a	a
□	Kasrah	i	i
□	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَاتِبَةَ kataba
- فَعَلَةَ fa`ala
- سُلَيْلَةَ suila
- كَيْفَيَةَ kaifa
- حَوْلَةَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
كَسْرَة	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
دَمْمَة	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَلَّa qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ**

Allaāhu gafūrun rahīm

- **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ**

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

k. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = *subḥānahu wata `alā*

saw. = *Shallallahu `Alaihi wa Sallam'*

a.s. = *alaihis salam*

H = *Hijriah*

<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. mempunyai harkat, martabat (*dignity*) dan kedudukan yang sama di muka bumi, baik yang terlahir sempurna maupun dalam kondisi disabilitas, ketidaksempurnaan itu tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas.¹ Disabilitas merupakan suatu kekurangan yang terjadi berupa penurunan fungsi fisik atau perubahan struktur tubuh, seperti kelumpuhan atau gangguan penglihatan.² Hambatan penurunan nilai mengurangi produktivitas dan menghalangi orang melakukan aktivitas tertentu yang memerlukan fungsi fisik. Sikap negatif masyarakat lainnya terhadap penyandang disabilitas adalah terkait kemandiriannya. Keterbatasan kemandirian ini menyebabkan penyandang disabilitas memiliki harga diri yang rendah.³

Penyandang disabilitas seringkali mengalami tekanan dari orang-orang di sekitarnya, bahkan dari keluarga sendiri. Seringkali lingkungan keluarga tidak memiliki ataupun menanamkan keyakinan bahwa penyandang disabilitas juga dapat berkembang dan mengeyam pendidikan.⁴ Keluarga seharusnya menjadi motivator dan memahami kondisi keluarga disabilitasnya, akan tetapi justru keluarga sendiri dari penyandang disabilitas yang tidak mendukung perkembangan pada penyandang disabilitas, jadi pemberdayaan seharusnya

¹ R R Putri A Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 215–23.

² Nida Salsabila, Hetty Krisnani, and Nurliana Cipta Apsari, “Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2019): 190.,

³ Elvia Agustina and Tience Debora Valentina, “Penerimaan Diri Penyandang Disabilitas,” *Psychopreneur Journal* 7, no. 1 (2023): 29–45.

⁴ Rektorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI., “Masyarakat ASEAN Edisi 1: Mewujudkan Masyarakat ASEAN Yang Dinamis,” n.d.

mampu menjangkau pola pikir anggota keluarga nondisabilitas sehingga dapat membentuk dan memahami keluarga disabilitasnya sendiri.

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Mereka juga memiliki hak, tugas dan peran yang sama sebagai masyarakat yang mampu untuk meraih cita-cita serta memperoleh pendidikan dalam mengasah potensi atau kemampuan dan keterampilan mereka, memiliki hak untuk kehidupan yang layak, dan mempunyai kemampuan dalam berkarya hingga menghasilkan sebuah karya-karya yang memiliki nilai jual untuk dipasarkan.⁵

Penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain kurangnya akses informasi tentang pentingnya melakukan rehabilitas, kurangnya fasilitas umum pada bangunan umum yang mempermudah para penyandang cacat melaksanakan rutinitasnya sehari-hari, kurangnya akses pekerjaan untuk penyandang cacat serta ketersediaan fasilitas khusus seperti alatalat pembantu kesehatan bagi penyandang disabilitas yang masih terbilang minim.⁶ Dalam hal ini, Pemerintahan harus lebih memperhatikan pentingnya fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan impian-impian atau kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan serta menunjang kaum disabilitas agar sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat layaknya masyarakat normal.⁷

Pengertian penyandang disabilitas didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan:Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami

⁵ Dkk Hilmiah, “Analisis Deskriptif Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,” 2019, h.115.

⁶ Karunia, “Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas” 4, no. June (2016): 2016.

⁷ Julita Widya Dwintari, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 5, no. 1 (2021): 29–51,

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁸ Selain itu, keberagaman Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Agustus 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

1. Penyandang disabilitas fisik, antara lain keterbatasan motorik, amputasi, lumpuh atau kaku, paraplegia, Cerebral Palsy (CP), stroke, kusta, dan orang bertubuh kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual adalah orang yang tingkat kecerdasannya di bawah rata-rata dan fungsi berpikirnya terganggu, seperti lambat belajar, keterbelakangan mental, atau sindrom Down.
3. Penyandang disabilitas mental memiliki gangguan pada fungsi berpikir, emosi, dan perilaku, seperti:
 - a. Psikososial meliputi skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan kepribadian.
 - b. Disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan berinteraksi sosial antara lain autisme dan gangguan hiperaktif.
4. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah orang yang mempunyai gangguan pada salah satu fungsi panca indera, antara lain gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan/atau gangguan bicara.⁹

Peran pemerintah sebagai regulator adalah merencanakan langkah-langkah untuk menyelaraskan pelaksanaan pembangunan melalui perumusan berbagai peraturan. Mengingat peran tersebut, pemerintah telah mengembangkan bahan referensi dasar bagi masyarakat sebagai alat untuk memandu berbagai

⁸ “Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” 2016.

⁹ Aprilina Pawestri, “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional,” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2017).

kegiatan pemberdayaan.¹⁰ Pemerintah berupaya menciptakan keselarasan dalam penjaminan dan perlindungan hak-hak, termasuk hak penyandang disabilitas. Hal ini tentu saja merupakan komitmen mutlak yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi mereka yang sempurna jasmani dan rohani, namun juga bagi mereka yang berkebutuhan khusus dan memerlukan perbaikan. Sekitar 15% penduduk dunia hidup dengan disabilitas, menurut laporan Pusat Layanan Keuangan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2021.

Dalam ajaran Islam, kesetaraan bagi para penyandang disabilitas sudah tertuang sejak zaman dahulu dalam QS An-Nur ayat 61 yang menyatakan bahwa kesetaraan antara penyandang disabilitas dan orang non disabilitas adalah senantiasa memperlakukan penyandang disabilitas secara serata dan menerima didalam masyarakat tanpa pamrih, tidak ada kata diskriminasi hidup bersosial. Dalam QS An-Nur ayat 61 menjelaskan tentang kesetaraan antara penyandang disabilitas dan non disabilitas:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى
أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِنْ بَيْوَتِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ أَبَائِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ أَمْهَاتِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ إِخْوَانِكُمْ
أَوْ بَيْوَتِ أَخْوَاتِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بَيْوَتِ
خَلِيلِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ
أَشْتَاتًا قَدْ إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْوَتًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحْيَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahan:

¹⁰ Syamraeni, “Peran Organisasi Ikatan Difabel Enrekang Inkusi Dalam Pemberdayaan Penyandang Difabel Di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang” (2023).

“Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di duramahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah.

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat (-Nya) kepadamu agar kamu mengerti.

Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Syekh Ali As-Shabuni dalam Tasfir Ayatul Ahkam. Beliau menjelaskan bahwa dalam QS An-Nur ayat 61, bahwa tidak berlaku dosa bagi hamba-hamba Allah yang mempunyai uzur dan penyandang disabilitas (tunantetra, pincang, sakit) untuk makan dan minum bersama hamba Allah yang sehat (normal), karena Allah Swt. benci terhadap kesombongan, dan suka terhadap kerendah-hatian darp para hamba-Nya. Dari pemaparan tersebut dijelaskan bahwa Allah sudah mengatur dari ratusan tahun lalu bahwa Allah membenci hambanya yang melakukan kesombongan serta perlakuan dzolim ke sesama hambanya yang menyandang disabilitas, karena semua di hadapan Allah Swt. semuanya sama yang membedakannya hanya amal shaleh.¹¹

Pada akhir tahun 2022, populasi dunia diperkirakan akan mencapai sekitar 7,95 miliar orang, dan dari populasi tersebut, sekitar 1,2 miliar orang di seluruh dunia akan menyandang disabilitas. Menurut WHO, 80% di antaranya tinggal di negara berkembang. Saat ini terdapat 35 negara berkembang dan

¹¹ Fakhri Muhammad Firdaus, “Perkembangan Keagamaan Pada Anak Disabilitas (Studi Deskripsif Pada Anak Tuna Ragu Di SLB Budi Mulia Cililin)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan akan mencapai 22,97 juta jiwa pada tahun 2023, yaitu sekitar 8,5% dari total penduduk Indonesia. Tingkat kecacatan tertinggi terjadi pada kelompok lanjut usia.¹² Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2.055 jiwa dari 12 Kecamatan. Pada tahun 2024 jumlah penyandang disabilitas di Desa Taulo sebanyak 27 orang. Dimana kategori disabilitas fisik berjumlah 5 orang, disabilitas intelektual berjumlah 13 orang, disabilitas mental sebanyak 3 orang, disabilitas rungu sebanyak 2 orang, dan disabilitas tunanetra sebanyak 4 orang.

Pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kabupaten yang berkeinginan secara aktif menegaskan dan mewakili perlindungan dan jaminan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa. Pada tataran hukum formal, langkah awal menuju perwujudan hak asasi penyandang disabilitas dimulai dari pembuatan peraturan daerah yang menjamin terwujudnya hak asasi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah Enrekang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan segala bentuk dukungan, tujuan dan peluang. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan negara, pemerintah provinsi sebagai penyedia teknologi dan penyediaan infrastruktur bagi penyandang disabilitas merupakan unsur dukungan terhadap penyandang disabilitas (Bab 1, Pasal 1) seperti yang dijelaskan pada perda tersebut.¹³

¹² Anshori Daulatul Islam et al., “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung,” *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (2024): 362–77.

¹³ Ahmad Mustanir et al., “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Enrekang,” *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información* 4, no. 2 (2021): 2013–15.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis di Kantor Desa selaku pemerintah desa yang mengurus penyandang disabilitas Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang diperoleh informasi bahwa terdapat sebanyak 27 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Sebagian besar kategori penyandang disabilitas yang terbanyak adalah disabilitas intelektual. Dalam pelaksanaannya masih diperoleh kendala yakni desa ini masih belum termasuk desa inklusif, artinya semua keperluan penyandang disabilitas yang ada di desa ini hanya diserahkan kepada dinas sosial. Oleh karena itu, berdasarkan masalah tersebut, penulis terdorong untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana peran pemerintah desa untuk memberdayakan penyandang disabilitas dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu: “Bagaimana pemerintah Desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”. Dari pokok permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran yang dilakukan pemerintah desa terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?
- b. Bagaimana hasil pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa terhadap penyandang disabilitas di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Hasil

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengertahui peran yang dilakukan pemerintah desa terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Tauko Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
- b. Untuk mengertahui hasil pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa terhadap penyandang disabilitas di Desa Tauko Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai referensi atau tambahan informasi terhadap para mahasiswa terkhusus jurusan pengembangan masyarakat islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.
 - 2) Menambah pengalaman dan pengetahuan penelitian tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan penjelasan diatas, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memiliki manfaat praktis seperti:

1) Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik

2) Bagi Pihak Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan aksesibilitas, pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang lebih mudah dijangkau, pemerintah desa juga dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.

3) Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian tinjauan relevan ini, peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang selaras dengan topik penelitian yang sedang dikaji yang kemudian menjadi salah satu referensi dalam melakukan penelitian. Adapun beberapa penelitian terkait pemberdayaan penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Artikel jurnal Frichy Ndaumanu pada tahun 2020 dengan judul “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Pemerintah Dearah”. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta menganalisis hambatan terhadap pelaksanaan upaya tersebut. Penelitian ini akan mengulas secara spesifik dan komprehensif upaya pemerintah daerah pengimplementasikan tiap kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006. Dalam tulisan ini terungkap bahwa hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara maksimal karena minimnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, belum adanya pendataan dan informasi, stigmatisasi serta faktor sosial budaya. Dibutuhkan peraturan daerah yang menjabarkan kewajiban pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas.¹⁴

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah penelitian terdahulu lebih berfokus memberi gambaran tentang bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh pemerintah daerah sedangkan penelitian

¹⁴ Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131,

sekarang lebih berfokus untuk mengetahui peran dan hasil pemberdayaan yang sudah dilakukan pemerintah Desa terhadap penyandang disabilitas.

2. Artikel jurnal Liliek Winarni, dkk pada tahun 2021 dengan judul *“Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo”*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh peran yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* yang dilakukan oleh pemerintah Desa Maron dengan Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, KSM Tali Kasih serta pihak swasta yaitu komunitas lokal dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pemberdayaan disabilitas belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator *collaborative governance* menurut DeSeve yang belum tercapai yaitu belum adanya komitmen yang kuat pada semua *stakeholder*, belum adanya kepercayaan yang kuat antar *stakeholder*, belum adanya aturan resmi terkait kolaborasi pemberdayaan masyarakat disabilitas serta belum akses sumber daya yang masih terbatas terutama anggaran dan juga prasarana. Rekomendasi pada penelitian ini adalah pemerintah dapat membuat program bantuan nasional untuk disabilitas, pemerintah bekerjasama dengan UMKM untuk pemberdayaan disabilitas.¹⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni sama-sama membahas pemberdayaan disabilitas oleh pemerintah Desa. Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus pada peran *stakeholder* dalam kolaborasi pemberdayaan, sedangkan penelitian sekarang fokus pada peran dan hasil pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa.

¹⁵ Riska Wirawan, Ika Nur Afni, and Liliek Winarni, “Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo,” *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 19, no. 2 (2022): 137–43,

3. Artikel jurnal Afifah Az-Zahra dan Almisar Hamid pada tahun 2022 dengan judul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Program Keterampilan Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta Barat”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dengan memberikan sebuah daya yang berasal dari pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh PSBD Budi Bhakti yang mempunyai program pemberdayaan melalui program keterampilan, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui proses program pemberdayaan keterampilan, faktor pendukung dan penghambat program tersebut dan mengetahui hasil yang dirasakan oleh WBS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh PSBD Budi Bhakti melalui dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder dimana terlihat adanya perubahan dan peningkatan WBS dilihat dari segi pola pikir yang jauh lebih maju dan positif, bertambahnya wawasan mengenai keterampilan. Terciptamya kemandirian yang dapat memberikan daya dalam kemampuan mereka, dan meningkatkan kualitas mutu diri penyandang disabilitas. Adanya faktor pendukung yang berkaitan dengan sarana prasarana, dan APBD, dan lingkungan yang baik dan mendukung, lalu faktor penghambat berkaitan dengan penyaluan WBS dan penjualan produk keterampilan.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama meneliti pemberdayaan disabilitas dan hasil yang dicapai. Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti pemberdayaan dalam lingkungan panti

¹⁶ Afifah Az-Zahra and Almisar Hamid, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Program Keterampilan Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta Barat,” *Journal of Social Work and Social Services*, vol. 3, 2022.

sosial dengan program keterampilan, sedangkan penelitian sekarang meneliti pemberdayaan oleh pemerintah desa dalam konteks masyarakat umum.

4. Skripsi Syamraeni pada tahun 2023 dengan judul “Peran Organisasi Ikatan Difabel Enrekang Inklusi Dalam Pemberdayaan Penyandang Difabel Di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:Bentuk pemberdayaan Organisasi Ikatan Difabel Enrekang Inklusi meliputi pelatihan mental dan mandiri, pelatihan bahasa isyarat, pelatihan keterampilan, bantuan pendampingan, bantuan modal usaha, kemudian hasil pemberdayaan Ikatan Difabel Enrekang Inklusi yaitu: penerimaan diri, *self presentation* (presentasi diri), pengakuan masyarakat, dukungan sosial pemerintah, peningkatan ekonomi, dan jaminan kesehatan khusus.¹⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah penelitian terdahulu fokus pada peran organisasi non-pemerintah, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada peran dan hasil pemerintah desa. Persamaannya yakni sama-sama meneliti bentuk dan hasil pemberdayaan disabilitas.

B. Landasan Teoritis

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran adalah komponen status yang dinamis. Jika seseorang memenuhi tugas dan hak mereka sesuai dengan posisi mereka, maka seseorang memainkan peran mereka.¹⁸ Itu tergantung satu sama lain dan sebaliknya, sehingga tidak dapat memisahkan keduanya. Karena pola interaksi sosial mereka, setiap orang memainkan peran yang berbeda untuk

¹⁷ Syamraeni, “Peran Organisasi Ikatan Difabel Enrekang Inklusi Dalam Pemberdayaan Penyandang Difabel Di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.”

¹⁸ Zamrodah, “Peran Pembimbing Dalam Mengatasi Perkembangan Kognitif Studi Kasus Di UPT. Panti Social Pengasuhan Anak Dinas Social Provinsi Riau.,” *UIN Suska Riau* 15, no. 2 (2019): 1–23,

hidup. Ini berarti bahwa fungsi secara bersamaan menentukan apa yang akan ia sumbangkan kepada masyarakat dan apa yang mungkin ia tawarkan kepadanya. Adapun menurut para ahli peran merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang, kelompok, organisasi, badan atau lembaga krena status atau jabatan yang diembannya, yang akam mempunyai pengaruh terhadap lingkungan atau kelompok.¹⁹

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁰

b. Ciri-ciri Peran

Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.²¹ Peranan dapat dikenali dengan melihat ciri-cirinya dalam kegiatan kehidupan masyarakat. Adapun ciri-ciri peran yaitu:

1) Keterlibatan Dalam Keputusan

Keterlibatan dalam mengambil keputusan pada kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian dari ikut keikutsertaan dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati tersebut.

¹⁹ Sulastri Sulastri Yudela Arina, Sufyarma Marsidin, “Peranan Tenaga Administrasi Dalam Peningkatan Mutu Layanan Di Sekolah Yudela,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 9145–51.

²⁰ Aflii Unique, “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm): Inventarisasi Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,” *Seminar Nasional Biotik*, no. 0 (2023): 1–23.

²¹ Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 243.

2) Bentuk Kontribusi

Yaitu bentuk partisipasi aktif dalam memberikan gagasan, ide, tenaga maupun materi dalam kegiatan atau program pemerintah yang sedang dijalankan.

3) Organisasi Kerja

Dalam sebuah organisasi kerja pada umumnya terdapat pembagian peran yang jelas dan tercantum dalam struktur organisasi. Pembagian peran harus terjadi agar jelas dalam pembagian tugas.

4) Penetapan Tujuan

Peranan dapat diidentifikasi dari penetapan suatu tujuan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kelompok bersama pihak lain.

5) Peran Masyarakat

Peran masyarakat adalah sebagai subjek, subjek dari berbagai macam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya bahwa masyarakat menjadi peran utama dalam kegiatan pembangunan. Peran masyarakat menjadi elemen penting pembangunan.²²

2. Pemerintahan

Pemerintah berasal dari kata “*perintah*” yang setelah ditambah awalan “*pe*” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “*an*” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “*pemerintah*” dengan “*pemerintahan*” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri.²³

²² Rizky Ika Widianto, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas,” 2018.

²³ Arif Wicaksana and Tahar Rachman, “Konsep Ilmu Pemerintahan,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27,

Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ada dua pihak yang terlibat,
- 2) Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah,
- 3) Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat,
- 4) Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan.²⁴

Secara umum, pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu.²⁵ Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki:

- 1) Otoritas memerintah dari sebuah unit politik,
- 2) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political*),
- 3) *Aparatus* yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan,
- 4) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.²⁶

Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin; *governare*, *greek kybernan* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Tujuan pemerintah meliputi *external security*, *internal order*, *justice*, *general welfare* dan *freedom*. Adapun tujuan pemerintah menurut pendapat.²⁷

²⁴ Bob(Postle industries) Miller, *Sosiologi Pemerintahan*, vol. 1, 1987.

²⁵ M S ISMAIL NURDIN, "Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan," 2017,

²⁶ Abdul Kadir, "Studi Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik," 2017, 108–9.

²⁷ Yudi Rusfiana and Cahya Supriatna, "Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan," *Alfabeta Bandung*, 2021, 148.

- 1) S.E. Finer, pemerintah mempunyai kegiatan terus menerus (*process*), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabat yang memerintah (*the tudy*), dan cara atau metode serta sistem (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakatnya.
- 2) R.Mac Iver, yang memandang pemerintah dari sudut disiplin ilmu politik, “*government is the organization of men under authority...how men can be governed*”. Maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan...bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi ilmu pemerintah adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (*a science of how men are governed*).²⁸

Desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu *dhesi*, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993) disebutkan Desa adalah:

- 1) Sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun.
- 2) Uzik atau dusun dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota.
- 3) Tempat, tanah,daerah.²⁹

Sedangkan masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang ukurannya lebih kecil dan letaknya diluar kota. Masyarakat desa adalah bentuk persekutuan abadi antara manusia dan institusinya dalam wilayah setempat, yaitu tempat mereka bertempat tinggal di rumah-rumah pertanian yang tersebar dan dikampung yang biasanya menjadi pusat kegiatan bersama, dan sering disebut masyarakat pertanian.³⁰

²⁸ Kiki Endah, “Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa,” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 135–43,

²⁹ Ralph Adolph, “Desa Dalam Tinjauan Hukum, Sosial, Dan Ekonomi,” 2016, 1–23.

³⁰ Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa* (Perpustakaan Nasional RI, 2022).

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan (*Empowerment*), berasal dari kata “power” yang berarti kemampuan, tenaga, atau kekuasaan.³¹ Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau setidaknya diserupakan dengan istilah pengembangan.³² Bahkan dua istilah ini, dalam batasan-batasan tertentu bersifat interchangeable atau dapat dipertukarkan. Dengan demikian secara harfiah, “pemberdayaan” dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan, tenaga, kekuatan atau kekuasaan.³³ Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran potensi itu menjadi tindakan nyata.³⁴ Pemberdayaan merupakan cara untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah, secara konseptual, pemberdayaan dapat didefinisikan dalam banyak hal tergantung pada konteks dan perspektif orang yang mendefinisikannya. Namun, gagasan dasar pemberdayaan adalah upaya mewujudkan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional dibidang politik, ekonomi, sosial, dan bidang lainnya. Lebih tepatnya, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan secara kesinambungan, baik bagi individu atau kelompok, untuk mengembangkan daya (potensi) dan kemampuannya sendiri sehingga mampu melakukan perubahan sosial.³⁵

³¹ Dwi Iriani Margayaningsih, “Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa,” *Jurnal Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88.

³² zamharirah Saleh Et Al., “Development Of Children ’ S Self-Potential Through Majelis Anak Saleh Activities In Parepare City Pendahuluan (2022): 48–58.

³³ Fadillah, Aswan, and Khurin’In Ratnasari, “Pemberdayaan Komunitas Anak Jalanan Rerminil Tawang Alun Berbasis Kewirausahaan Dan Media Sosial (Entrepreneurship) Di Kabupaten Jember,” *Auladuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 02 (2024).

³⁴ Diky Nurhakim, Wahyu Gunawan, and Hery Wibowo, “Fungsi Kelompok Usaha Berkah Bersama (KUBBE) Dalam Pemberdayaan Pemuda,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 2 (2023): 164–77.

³⁵ Margayaningsih, “Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa.”

Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, menswadayaikan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks ini, pemberdayaan dapat dipersamakan dengan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya.³⁶

a. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2013:105) pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lama.
2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat. Karena perasan senang atau tidak senang akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa mendatang.
3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan atau menghubungkan kegiatannya dalam kegiatan/peristiwa yang lainnya.³⁷

³⁶ Afriansyah, *Pengertian Dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat*, *Pemberdayaan Masyarakat*, 2023.

³⁷ Nur Alif Abdul Kholik, “Pemberdayaan Santri Dalam Public Relations Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri,” *Etheses IAIN Kediri*, 2021, 13.

b. Tujuan pemberdayaan

Adapun tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto (2013:109), adalah:

1. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaikan Usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis ygng dilakukan.
3. Perbaikan Pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
4. Perbaikan Lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapat yang terbatas.
5. Perbaikan Kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.³⁸
6. Perbaikan Masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.³⁹

³⁸ Simson Ginting and Robinson Sembiring, "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kolam Soda Desa Buluh Naman Kecamatan Munte Kabupaten Karo," *Jurnal Pengabdian Nasional*, vol. 02, 2022.

³⁹ Rudi Kristian Simson Ginting, Robinson Sembiring, Arlina, Elita Dewi, "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kolam Soda Desa Buluh Naman Kecamatan Munte Kabupaten Karo," *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional* 02, no. 05 (2022): 10–19,

C. Kerangka Konseptual

1. Disabilitas

Disabilitas berasal dari bahasa inggris “*Disability*” yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁴⁰ Dulu disabilitas dikenal masyarakat dengan sebutan penyandang cacat, tetapi sekarang ini sudah tidak lagi menggunakan istilah tersebut dan telah diganti dengan istilah penyandang disabilitas akibat dari adanya kesan negatif yang terkandung dalam penggunaan istilah penyandang cacat.⁴¹

a. Klasifikasi penyandang disabilitas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang cacat.⁴² Undang-undang tersebut memberikan definisi penyandang cacat adalah “setiap orang yang mengalami/keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.⁴³

a) Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah disabilitas yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.⁴⁴ Terdapat beberapa istilah yang berhubungan dengan disabilitas fisik yaitu *disability* dan *handicap*. *Disability* adalah kerusakan baik secara fisiologi, anatomi, maupun fungsi psikologis yang diakibatkan oleh suatu

⁴⁰ Salsabila, Krisnani, and Apsari, “Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik.”

⁴¹ Oleh: Kartika And Gabriela Rompis, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia 1,” *Lex Administratum*, 2016.

⁴² Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” 2016, 139–41.

⁴³ Hairani Siregar et al., “Pemenuhan Hak Sipil Anak Disabilitas Di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 29, no. 4 (2023): 722–29.

⁴⁴ Elvia Agustina and Tience Debora Valentina, “Penerimaan Diri Penyandang Disabilitas Fisik Pasca-Lahir,” *Psychopreneur Journal* 7, no. 1 (2023): 29–45.

penyakit, luka, atau karena bawaan sejak lahir, sedangkan *handcup* adalah kerusakan yang lebih mengarah pada gangguan yang alami oleh seorang sebagai akibat dari *disability* yang dimilikinya.⁴⁵

Penjelasan *diatas*, dapat diketahui bahwa ciri-ciri dari seseorang yang mengalami disabilitas fisik adalah mereka yang mengalami kelumpuhan atau ketidaklengkapan terhadap salah satu anggota tubuhnya. Disabilitas juga dapat disimpulkan sebagai dimana kondisi seseorang yang mengalami kerusakan, baik fisik maupun mental yang dapat diakibatkan oleh suatu penyakit, luka atau bawaan lahir.

b) Penyandang disabilitas mental

Kelainan mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Cacat mental adalah: “suatu keadaan perkembangan mental yang berhenti atau tidak lengkap, yang teruma ditandai oleh adanya (*impairment*) keterampilan (kecakapan, skills) selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingka intelelegasi, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial.⁴⁶

c) Penyandang disabilitas sensorik

Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi pancha indra. Yang termasuk jenis disabilitas ini adalah disabilitas wicara, rungu, netra. Untuk berinteraksi dengan difabel wicara, rungu dan netra membutuhkan keahlian dalam menggunakan bahasa isyarat.⁴⁷

d) Penyandang disabilitas intelektual

Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ dibawah rata-rata, kesulitas memproses informasi, dan keterbatasan dalam

⁴⁵ Chika Riyanti and Nurliana Cipta Apsari, “Gambaran Aktualisasi Diri Penyandang Disabilitas Fisik Yang Bekerja,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020): 40,

⁴⁶ S.Sujarwo R. Septianingsih,D. Safitri, “Kebutuhan Dan Strategi Pendampingan Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Mi,” *Cendekia Pendidikan* 1, no. 1 (2023): 1–13.,

⁴⁷ Dkk Wagisri, Nopriawan Mahriadi, Siti Lady Havivi, “Motivasi Dan Bimbingan Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Di Kota Palembang” 5, no. 1 (n.d.): 77–86.

berkomunikasi, sosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah *down syndrome* dan keterlambatan tumbuh kembang.⁴⁸

Upaya pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir.⁴⁹ Beberapa perkembangan tersebut di antaranya:

- a. Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa mengatur pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang, jaminan hak orang dengan gangguan jiwa, serta pengaturan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa. Salah satu yang diatur adalah “kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk meminta pertimbangan ahli sebelum melakukan pemeriksaan pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum”. Prosedur pemeriksaan ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.⁵⁰
- b. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai perlindungan lebih dan khusus bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas, mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, serta membutuhkan akomodasi yang layak di peradilan.⁵¹
- c. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk

⁴⁸ Syamraeni, “Peran Organisasi Ikatan Difabel Enrekang Inklusi Dalam Pemberdayaan Penyandang Difabel Di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.”

⁴⁹ July Wiarti, “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 87–109,

⁵⁰ Denny Indriawan, Setya Wahyudi, and Sri Wahyu Handayani, “Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia” 5, no. 4 (2025): 3159–73.

⁵¹ Imas Sholihah, “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas,” *Sosio Informa* 2, no. 2 (2016): 166–84.,

mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala ospek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

- d. Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Walaupun PERMA ini tidak secara langsung mengatur tentang penyandang disabilitas, namun beberapa aturan dapat menjadi acuan bagi pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas. Contohnya pasal 9 yang memberikan kesempatan kepada perempuan yang mengalami hambatan fisik dan psikis untuk mendapatkan pendampingan.⁵²
- e. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Peradilan Umum. PTSP merupakan pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses terkait pelayanan pengadilan. PTSP bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peraturan ini juga menyertakan aturan penyelenggaraan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dipengadilan, seperti pengaturan ukuran meja informasi yang dirancang untuk mendukung penyandang disabilitas agar dapat bertatap muka dengan petugas informasi.⁵³
- f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan perhimpunan advokat indonesia (PERADI) diakhir tahun 2017, dengan harapan advokat dapat

⁵² Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,” *Sakina: Journal of Family Studies*, 2017,

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri,” n.d.

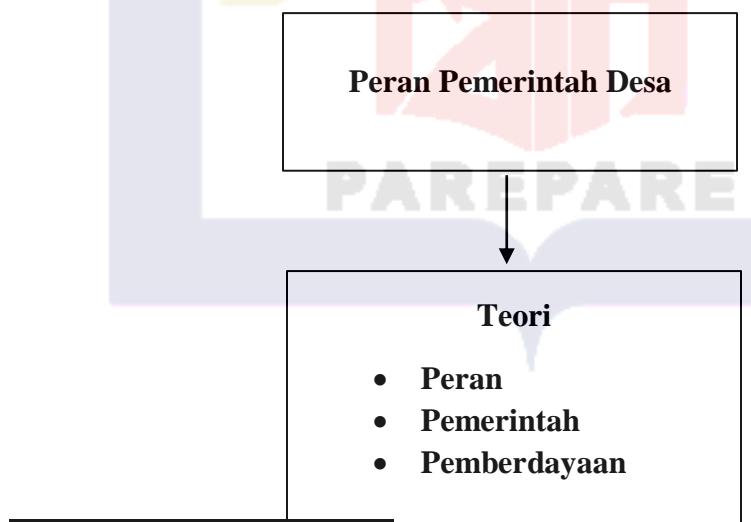
memberikan bantuan hukum secara probono terhadap perempuan penyandang disabilitas.⁵⁴

D. Kerangka Pikir

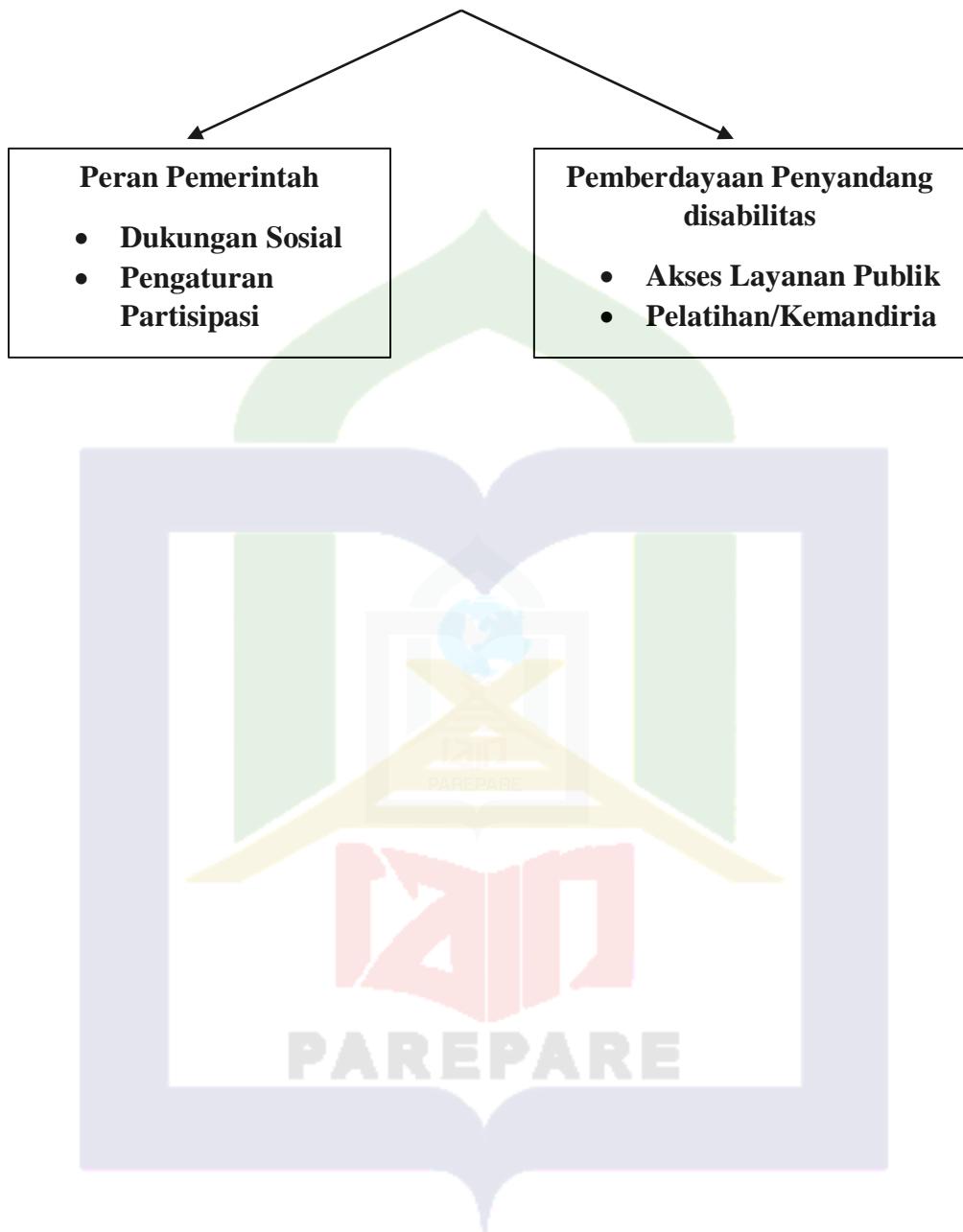
Objek kajian dalam penelitian ini yaitu Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Taulo Kec. Alla Kab. Enrekang, yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengertahui bentuk dan hasil pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa terhadap penyandang disabilitas di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang serta kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang akan diberikan di akhir penelitian.

Bagan yang dibuat adalah cara berfikir peneliti guna mempermudah pembaca dalam berpikir sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dimengerti. Adapun bagan yang dibuat tidak lepas dari judul penelitian, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



⁵⁴ dio Ashar, Inatsan Ashila Bestha, And Nadia Pramesa Gita, “Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan,” 2019, 1–113.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang akan diamati.⁵⁵ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena sosial melalui data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tertulis, serta perilaku yang diamati secara langsung. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, yang digunakan untuk mengkaji secara mendalam bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap penyandang disabilitas di Desa Taulo, kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses, startegi, dan dampak dari program pemberdayaan dalam konteks lokal yang spesifik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Peneliti akan melaksanakan penelitian dalam waktu ± 2 bulan sejak proposal ini diterima.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pusat perhatian yang harus dicapai dalam melakukan penelitian. Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian perlu dikemukakan untuk memberikan gambaran yang lebih terarah tentang apa yang akan diteliti.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010) h.63

Penelitian yang dilakukan akan berfokus pada Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama pada penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti data tertulis.⁵⁶ Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah dilakukan. Sumber data terbagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dilakukan dalam pengumpulan data iailah:

1. Sumber data primer. Sumber data primer merupakan pengumpulan yang diperoleh dengan teknik wawancara dengan para narasumber di lapangan. Dalam hal ini informasi dari pemerintah Desa Taulo sebanyak 3 orang, penyandang disabilitas Desa Taulo sebanyak 5 orang, masyarakat Desa Taulo Kabupaten Enrekang sebanyak 3 orang, Pemerintahan Dinas Sosial sebanyak 3 orang dan yang dianggap penulis atau penyusun dapat memberikan data dan informasi dalam kaitannya dengan objek kajian.
2. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder sebagai berikut:
 - a) Jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi penulis
 - b) Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi penulis
 - c) Literature, dokumen, dan hasil riset yang relevan serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penelitian penulis.⁵⁷

⁵⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81,

⁵⁷ Syamsuddin AB, *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*, h.100

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti.⁵⁸ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan mengunjungi, meninjau lokasi penelitian yaitu Pemerintah Desa Taulo Kecamatan Alla, serta mengamati secara langsung bentuk kegiatan yang berlangsung di lokasi penelitian dengan hasil pengamatannya digunakan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini aspek yang akan diobservasi adalah bentuk pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa Kabupaten Enrekang terhadap penyandang disabilitas di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (pemandu wawancara) dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang dijawabkan tidak terbatas pada suatu tanggapan saja dan mengarah pada pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal terstruktur.⁵⁹ Wawancara dilakukan apabila calon peneliti ingin mengetahui permasalahan yang akan diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen berupa catatan, foto, laporan maupun rekaman yang dianggap relevan oleh calon peneliti yang berkaitan dengan alokasi

⁵⁸ Ralph Adolph, "Metode Penelitian," 2016, 1–23.

⁵⁹ Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet,1; Bandung: Rosdakarya, 2002), h.180

penelitian di Desa Taulo Kecamatan Allah Kabupaten Enrekang. Metode dokumentasi sebagai penunjang dari hasil penelitian observasi dan wawancara.⁶⁰

F. Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.⁶¹ Adapun keabsahan data yang bisa dilakukan antara lain:

1. *Credibility*

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil dari penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.⁶²

a) Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.⁶³ Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi). Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Setelah di cek kembali ke lapangan data sudah

⁶⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828.,

⁶¹ Ruth Bunga Sigourney, "Uji Keabsahan Data, Content Analysis Dalam Penelitian Kualitatif," 2022, 2022.

⁶² Indriawan, Wahyudi, and Handayani, "Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia."

⁶³ UH Nafiah, "Metode Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99,

benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesimbungan.⁶⁴ Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c) Tringulasi

Tringulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁶⁵

2. *Transferability*

Transferability adalah validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.⁶⁶ Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks

⁶⁴ Muhammad Syahran, “Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif,” *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23,

⁶⁵ AI Agustina, “Metode Penelitian,” *Metode Penelitian*, 2022, 32–41.

⁶⁶ Burhan Bungin (ED), “Metode Penelitian Kualitatif,” 2019, 21–32.

yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validasi nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama.⁶⁸ Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memproses hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.⁶⁹

4. *Confirmability*

Obyektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian.⁷⁰ Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh penelitian dengan

⁶⁷ Fitrah Jaiman, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Pendidikan Multikultural Di SMP Negeri 7 Mataram,” 2022, 1–23.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, “Metode Penelitian,” 2011, 32–41.

⁶⁹ Fadillah, “Pengaruh Kualitas Personal Dan Dependability Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Loket Pembayaran Pdam,” 2023.

⁷⁰ Arnild Augina Mekarisce, “Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, n.d., 40–46.

data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dan dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Tehnik analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan guna memberi makna terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan dan dilaksanakan secara kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.⁷¹ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian mengikuti langkah-langkah dari Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.⁷²

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini melewati tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan atau penyederhanaan data-data dari hasil catatan lapangan sehingga simpulan final dapat ditarik dan verifikasi.⁷³ Dalam hal ini, peneliti akan memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu agar hasil akhirnya dapat memberikan gambaran yang jelas.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

⁷¹ Rijali, “Analisis Data Kualitatif.”

⁷² Emzir, *Medologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 129-235

⁷³ Matthew b. Miles, dan A. Michael Huberman, “Analisis Data Kualitatif,” 2016, 1–23.

pengambilan tindakan.⁷⁴ Dengan mencermati penyajian data ini, maka peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif.⁷⁵ Dalam hal ini kesimpulan peneliti harus didukung oleh buku-buku yang valid karena harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohnanya.



⁷⁴ Kurniawan Candra Sugiyono Guzman and Working Oktarina, Nina Paper, “Bab Iii Metode Penelitian Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),” *Economic Education Analysis Journal* 7, no. 1 (2018): 335–36.

⁷⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, “Metodologi Penelitian Sosial,” 2016, 85–89.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Enrekang

Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak pada posisi antara $3014'36''$ - $3050'0''$ Lintang Selatan dan $119040'53''$ - $12006'33''$ Bujur Timur. Posisi ini terletak tepat di jantung Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Enrekang juga terletak di poros tengah Trans Sulawesi melalui jalan Strategis Nasional untuk Pariwisata di Tana Toraja. Kabupaten Enrekang merupakan salah satu wilayah strategis di Sulawesi Selatan dengan penetapan menurut Rencana Tata Ruang Provinsi Selawesi Selatan sebagai Kawasan Strategis untuk pembangunan tanaman Hortikultura dan Kopi.⁷⁶

Luas wilayah kabupaten Enrekang adalah $1.786,01 \text{ km}^2$ atau sebesar 2,83 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 desa/kelurahan. Luas masing-masing kecamatan yaitu Maiwa 392.87 km^2 dengan jumlah 22 Kelurahan dan Desa, Bungin 236.84 km^2 dengan jumlah 6 Desa, Enrekang 291.19 km^2 dengan jumlah 18 Kelurahan dan Desa, Cendana 91.01 km^2 dengan jumlah 8 Desa, Baraka 159.15 km^2 dengan jumlah 15 Kelurahan dan Desa, Buntu Batu 126.65 km^2 dengan jumlah 8 Desa, Anggeraja 125.34 km^2 dengan jumlah 15 Kelurahan dan Desa, Malua 40.36 km^2 dengan jumlah 8 Desa, Alla 34.66 km^2 dengan jumlah 8 Kelurahan dan Desa, Curio 178.51 km^2 dengan jumlah 11 Desa, Masalle 68.35 km^2 dengan jumlah 6 Desa, dan Baroko 41.08 km^2 dengan jumlah 5 Desa. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebelah Utara Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur Kabupaten Luwu, sebelah Selatan Kabupaten Sidrap, sebelah Barat Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial, terdapat beberapa warga yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas, baik fisik, sensorik, maupun intelektual. Namun perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas ini masih sangat terbatas, baik dari sisi perencanaan program maupun pelaksanaan kegiatan.

⁷⁶ Adolph, "Metod. Penelit."

Tabel 4.1
Rekap Data Penyandang Disabilitas Tahun 2024
Dinas Sosial Kab. Enrekang

No	Kecamatan	Jumlah
1	Maiwa	227
2	Bungi	80
3	Enrekang	281
4	Cendana	120
5	Baraka	268
6	Buntu Batu	142
7	Anggeraja	234
8	Malua	86
9	Alla	139
10	Curio	190
11	Masalle	194
12	Baroko	84
	Jumlah	2.055

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Enrekang, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Enrekang pada tahun 2024 yaitu sebanyak 2.055 jiwa dari 12 Kecamatan.

2. Letak Geografis Desa Taulo

Desa Taulo adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Alla dan berada di bagian utara Kabupaten Enrekang. Jarak tempuh wilayah Desa Taulo dari Ibukota Kabupaten Enrekang 49 km. Desa ini memiliki luas wilayah 404 Km², dengan potensi lahan yang produktif diantaranya lahan perkebunan, lahan pertanian dan hutan.

Letak geografis Desa Taulo berada di wilayah utara Kabupaten Enrekang. Adapun batas wilayah Desa Taulo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Salassa.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bolang.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kalosi.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekkala.

Secara geografis Desa Taulo memiliki kondisi daerah yang berbukit-bukit, berada diatas gunung dengan ketinggian 580 m diatas permukaan laut. Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang. Desa Taulo sendiri memiliki iklim tropis yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Desa Taulo memiliki luas wilayah 404 Km2 . Kepadatan penduduk sudah mencapai 1.268 jiwa penduduk tetap dengan jumlah kepala keluarga 258, penduduk laki-laki sebanyak 568 jiwa dari seluruh jumlah penduduk sementara penduduk perempuan sebanyak 700 dari seluruh jumlah penduduk. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Masyarakat Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang 100% beragama Islam. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor desa, terdapat beberapa warga yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas, baik fisik, sensorik, maupun intelektual. Namun perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas ini masih sangat terbatas, baik dari sisi perencanaan program maupun pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2024 jumlah penyandang disabilitas di Desa Taulo sebanyak 27 orang. Dimana kategori disabilitas fisik berjumlah 5 orang, disabilitas intelektual berjumlah 13 orang, disabilitas mental sebanyak 3 orang, disabilitas rungu sebanyak 2 orang, dan disabilitas tunanetra sebanyak 4 orang.

Tabel 4.2
Rekap Data Penyandang Disabilitas Tahun 2024
Desa Taulo Kec. Alla Kab. Enrekang

No	Nama	Jenis Kelamin	Disabilitas
1	Toli	P	Intelektual
	Syukur	L	Intelektual
	Suci Aulia Rinaldi	P	Intelektual
	Baco	L	Intelektual
	Haring	L	Intelektual
	Hasri	L	Intelektual
	Kamaruddin	L	Netra
	Alya	P	Intelektual
	Sahuding	L	Netra
	Sainal	L	fisik
	Saidul	L	fisik
	Podding	L	fisik

	Tri Septi Amanda	P	fisik
	M Haikal	P	fisik
	Indi	L	Intelektual
	Kunu	P	Netra
	Hendriani	P	Intelektual
	Nur Jannah	P	Mental
	M Rizky Athar	L	Intelektual
	Pole	L	Rungu
	Syamsul	L	Rungu, Netra
	Jibran	L	Intelektual
	Usman L	L	Mental
	Salwa	P	Intelektual
	Muhammad Wildan Hanif	L	Intelektual
	Nurfadila	P	Mental
	Siti Sulpiana	P	Intelektual

Sumber: Kantor Desa Taulo, Kec. Alla Kab. Enrekang 2024

Pada tahun 2024 jumlah penyandang disabilitas di Desa Taulo sebanyak 27 orang. Dimana kategori disabilitas fisik berjumlah 5 orang, disabilitas intelektual berjumlah 13 orang, disabilitas mental sebanyak 3 orang, disabilitas rungu sebanyak 2 orang, dan disabilitas tunanetra sebanyak 4 orang.

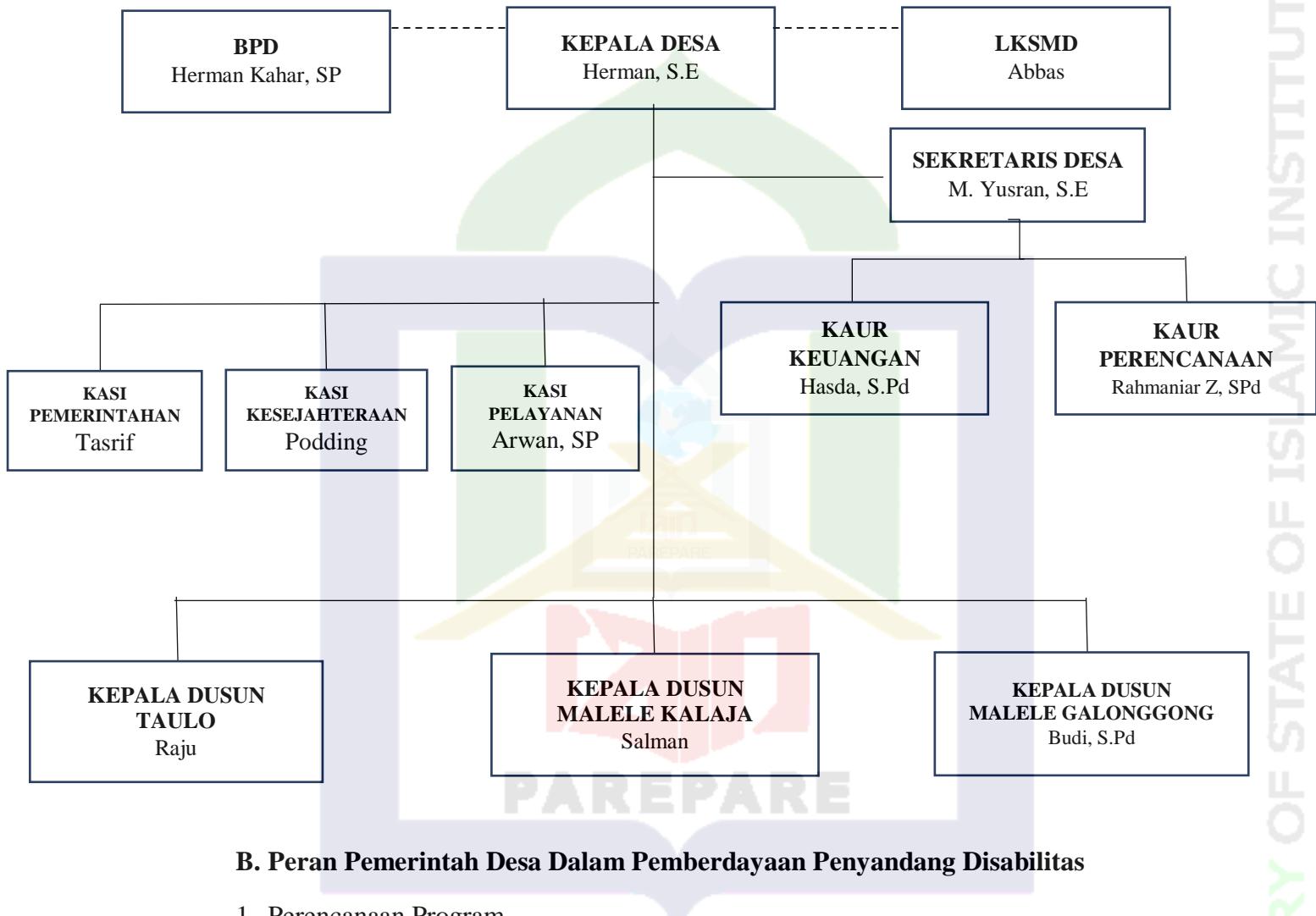
3. Struktur Perangkat Desa Taulo

Desa merupakan suatu bentuk kesatuan masyarakat yang memiliki hukum serta batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah setempat, didasarkan pada asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁷ Adapun struktur pemerintahan Desa Taulo adalah sebagai berikut:



⁷⁷ Lalu Sabardi, “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44Sabardi, no. 2 (2014): 170,

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA TAULO
KEC ALLA, KAB ENREKANG



B. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

1. Perencanaan Program

Pemerintah desa melakukan peran penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, terutama dalam tahap perencanaan program. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan identifikasi kebutuhan penyandang disabilitas melalui survei dan wawancara dengan mereka, keluarga, serta

masyarakat sekitar. Dengan pendekatan ini, pemerintah desa dapat memahami tantangan yang dihadapi, seperti aksesibilitas, pendidikan, dan peluang kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan memungkinkan pemerintah desa untuk merancang program-program yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata, seperti pelatihan keterampilan dan peningkatan aksesibilitas infrastruktur. Setelah kebutuhan diidentifikasi, pemerintah desa bertanggung jawab untuk merancang program-program yang inklusif. Ini mencakup pengembangan pelatihan keterampilan yang dapat membantu penyandang disabilitas memperoleh kemampuan baru, serta upaya untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas umum agar lebih ramah disabilitas.

Dalam proses ini, pemerintah desa juga memastikan bahwa program-program tersebut dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas, tanpa memandang jenis disabilitas yang mereka miliki. Dengan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif dari penyandang disabilitas, diharapkan program-program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Adapun hasil wawancara oleh Ibu Rahmaniari Z, S.Pd selaku Kaur Perencanaan Desa Taulo menyatakan bahwa:

“Kami berharap dengan perencanaan yang baik dan keterlibatan langsung dari penyandang disabilitas, program-program ini bisa memberikan manfaat besar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.”⁷⁸

⁷⁸ S.Pd Ibu Rahmaniari Z, “Wawancara Oleh Kaur Perencanaan Di Desa Taulo” 10 Juni 2025,”

Hasil wawancara tersebut mencerminkan harapan yang kuat dari pihak pemerintah dan masyarakat terkait perencanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas. Pernyataan ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dalam setiap tahap program. Dengan melibatkan mereka secara langsung, program yang dirancang akan lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan spesifik mereka.

Keterlibatan penyandang disabilitas tidak hanya memberikan perspektif yang berharga, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program tersebut. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana penyandang disabilitas merasa dihargai dan didukung. Selain itu, dengan perencanaan yang baik, program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Begitu pula hasil wawancara oleh Bapak Zulkarnain Kana Kepala Dinas Sosial Kabupaten Enrekang yang menyatakan bahwa:

*"Kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah penyandang disabilitas, jenis disabilitas, dan kebutuhan mereka. Ini penting agar program pemberdayaan yang kami rancang tepat sasaran."*⁷⁹

⁷⁹ Bapak Zulkarnain Kana, "Wawancara Oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Enrekang" 11 Juni 2025,"

Hasil wawancara tersebut menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa program pemberdayaan penyandang disabilitas dirancang berdasarkan data yang akurat dan relevan. Koordinasi dengan pemerintah desa menjadi langkah awal yang krusial dalam mengumpulkan informasi mengenai jumlah penyandang disabilitas, jenis disabilitas yang ada, serta kebutuhan spesifik mereka.

Pengumpulan data yang tepat sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Desa Taulo. Dengan memahami kondisi dan kebutuhan mereka, program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam memberikan dukungan yang diperlukan. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam aksesibilitas transportasi, maka program dapat difokuskan pada peningkatan infrastruktur atau penyediaan layanan transportasi yang ramah disabilitas.

Selain itu, pendekatan berbasis data ini juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Dengan demikian, hasil wawancara ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, sehingga program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

2. Alokasi Dana dan Dukungan Sumber Daya

Di Desa Taulo, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas. Meskipun

pemerintah desa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk melaksanakan semua program yang direncanakan. Sebagai contoh, program pelatihan keterampilan, penyediaan alat bantu, dan peningkatan aksesibilitas infrastruktur mungkin tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan karena anggaran yang terbatas. Hal ini mengakibatkan beberapa inisiatif yang penting untuk pemberdayaan penyandang disabilitas terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Selain itu, keterbatasan anggaran di Desa Taulo juga mempengaruhi kemampuan pemerintah desa untuk melakukan evaluasi dan pengembangan program yang ada. Tanpa dana yang cukup, sulit untuk melakukan survei atau penelitian yang diperlukan untuk memahami kebutuhan spesifik penyandang disabilitas di desa. Akibatnya, program yang dirancang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka, dan dampaknya menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mencari sumber pendanaan tambahan, baik dari pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah, maupun melalui kerjasama dengan sektor swasta, agar dapat mengatasi keterbatasan anggaran dan memastikan bahwa semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik demi kesejahteraan penyandang disabilitas di Desa Taulo. Hasil wawancara oleh Bapak Muh. Yusran S.E selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa:

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di desa ini. Namun, dana yang tersedia sering kali tidak

mencukupi untuk melaksanakan semua program yang kami rencanakan.

*Kami telah merencanakan beberapa program penting, tetapi harus memilih mana yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu.*⁸⁰

Hasil wawancara tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari pihak pemerintah atau organisasi terkait untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di desa tersebut. Namun, pernyataan ini juga menggarisbawahi tantangan signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut, yaitu keterbatasan dana.

Keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan dalam merealisasikan berbagai inisiatif yang telah direncanakan. Meskipun ada banyak program penting yang diusulkan untuk mendukung penyandang disabilitas, keterbatasan sumber daya memaksa pihak terkait untuk melakukan prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus melakukan analisis mendalam untuk menentukan program mana yang paling mendesak dan dapat memberikan dampak terbesar dalam jangka pendek.

Proses pemilihan ini tidak hanya melibatkan pertimbangan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan harapan penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan program yang dipilih dapat lebih relevan dan bermanfaat. Meskipun ada tantangan dalam hal pendanaan, komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas tetap menjadi fokus utama, dan upaya

⁸⁰ Bapak Yusran S.E, "Wawancara Oleh Sekretaris Desa Taulo" 10 Juni 2025,"

untuk mencari sumber dana tambahan atau kolaborasi dengan pihak lain juga dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.

3. Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
 - a) Program Perbaikan Pustu

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang inklusif. Dalam hal ini, pemerintah desa bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, pemerintah desa dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi.

Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, pemerintah desa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas serta mengurangi stigma negatif yang seringkali melekat pada mereka. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bermanfaat bagi penyandang disabilitas, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tasryf selaku Kaur Pemerintahan Desa Taulo mengatakan bahwa:

"Kami sudah periksa kondisi Pustu dan lihat bagian-bagian yang perlu diperbaiki, seperti jalan masuk, kamar mandi, dan tempat duduk tunggu.

Rencananya akan kami buat jalur lebih luas supaya teman-teman disabilitas bisa lebih mudah masuk.”⁸¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan perhatian yang serius terhadap aksesibilitas fasilitas kesehatan, khususnya Puskesmas Pembantu (Pustu), bagi penyandang disabilitas. Pernyataan ini mencerminkan langkah awal yang diambil untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah dan nyaman.

Dengan melakukan pemeriksaan kondisi Pustu, pihak terkait telah mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, seperti jalan masuk, kamar mandi, dan tempat duduk tunggu. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya infrastruktur yang ramah disabilitas. Misalnya, perbaikan jalan masuk dan pembuatan jalur yang lebih luas akan memudahkan penyandang disabilitas, terutama mereka yang menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya, untuk memasuki fasilitas kesehatan tanpa hambatan.

Rencana untuk memperbaiki fasilitas seperti kamar mandi dan tempat duduk tunggu juga sangat penting, karena kenyamanan dan privasi adalah aspek yang tidak boleh diabaikan dalam pelayanan kesehatan. Dengan melakukan perbaikan ini, diharapkan Pustu dapat menjadi tempat yang lebih inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka merasa dihargai dan mendapatkan layanan yang setara. Secara keseluruhan, pernyataan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan

⁸¹ Bapak Tasrif, “Wawancara Oleh Kaur Pemerintahan Desa Taulo” 10 Juni 2025,”

lebih aksesibel bagi semua anggota masyarakat. Adapaun yang dikatakan oleh Saidul (penyandang disabilitas Fisik) di Desa Tauло mengatakan bahwa:

“Saya sangat senang melihat perubahan yang telah dilakukan di Pustu. Jalur akses yang lebih lebar dan tanjakan yang telah dibangun membuat saya dan teman-teman disabilitas lainnya merasa lebih nyaman saat datang ke sini. Sekarang, kami tidak lagi kesulitan untuk masuk dan mendapatkan layanan kesehatan.”⁸²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merasa senang dengan perubahan yang telah dilakukan di Puskesmas Pembantu (Pustu). Mereka mengungkapkan bahwa jalur akses yang lebih lebar yang baru dibangun membuat mereka merasa lebih nyaman saat datang ke Pustu. Sekarang, mereka tidak lagi kesulitan untuk masuk dan mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Perbaikan infrastruktur ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya. Dengan adanya jalur yang lebih lebar dan tanjakan, mereka bisa bergerak dengan lebih mudah dan aman. Perasaan nyaman ini juga membuat mereka lebih termotivasi untuk mencari layanan kesehatan. Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Seperti yang dikatakan oleh Podding (Penyandang Disabilitas Fisik) di Desa Tauло mengatakan bahwa:

⁸² Saidul, “Wawancara Oleh Penyandang Disabilitas Fisik” 12 Juni 2025,”

“Ruang tunggu yang baru juga sangat membantu. Tempatnya lebih luas dan nyaman, sehingga kami bisa menunggu dengan tenang. Saya merasa diperhatikan dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat”⁸³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merasa sangat terbantu dengan ruang tunggu baru di Puskesmas Pembantu (Pustu). Mereka mengatakan bahwa ruang tunggu yang lebih luas dan nyaman membuat mereka bisa menunggu dengan tenang. Kenyamanan ruang tunggu ini penting karena membuat pengalaman mereka di fasilitas kesehatan menjadi lebih baik. Ketika mereka merasa nyaman, mereka lebih mungkin untuk kembali menggunakan layanan kesehatan di masa depan. Pernyataan bahwa mereka merasa diperhatikan dan dihargai menunjukkan bahwa perbaikan ini tidak hanya membantu secara fisik, tetapi juga membuat mereka merasa lebih diterima dalam masyarakat. Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan usaha untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Seperti yang dikatakan oleh ibu Hadasia sebagai masyarakat Desa Taulo yang mengatakan bahwa:

“Dampaknya sangat positif. Selain memudahkan penyandang disabilitas, ruang tunggu yang baru juga membuat semua orang merasa lebih nyaman. Kami bisa menunggu dengan lebih baik tanpa merasa sesak. Ini juga meningkatkan kesadaran kami tentang pentingnya aksesibilitas bagi semua orang.”⁸⁴

⁸³ Podding, “Wawancara Oleh Penyandang Disabilitas Fisik” 12 Juni 2025,”

⁸⁴ Ibu Hadasia, “Wawancara Oleh Masyarakat Desa Taulo” 12 Juni 2025,”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perubahan di ruang tunggu Puskesmas Pembantu (Pustu) memberikan dampak yang sangat baik. Penyandang disabilitas merasa lebih mudah mengakses layanan kesehatan, dan semua pengunjung juga merasakan manfaatnya. Ruang tunggu yang baru dan lebih nyaman membuat semua orang merasa lebih baik saat menunggu. Dengan ruang yang lebih luas, mereka tidak merasa sesak, sehingga menunggu menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, pernyataan ini menunjukkan bahwa kesadaran tentang pentingnya aksesibilitas meningkat. Ketika fasilitas kesehatan dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, masyarakat juga diingatkan akan pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah untuk semua orang. Dengan demikian, perubahan ini bermanfaat tidak hanya bagi penyandang disabilitas, tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap aksesibilitas. Adapun hasil wawancara oleh ibu Suharni orang tua dari salah satu penyandang disabilitas di Desa Taulo mengatakan bahwa:

“Kami sangat bersyukur dengan perbaikan ini. Jalur akses yang lebih lebar dan tanjakan membuat anak kami yang penyandang disabilitas bisa masuk ke Pustu dengan lebih mudah. Sebelumnya, kami sering kesulitan membawanya ke sini.”⁸⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan rasa syukur dari orang tua penyandang disabilitas atas perbaikan yang dilakukan di Puskesmas Pembantu (Pustu). Mereka mengungkapkan bahwa jalur akses yang lebih lebar dan tanjakan

⁸⁵ Ibu Suharni, “Wawancara Oleh Salah Satu Orang Tua Penyandang Disabilitas Di Desa Taulo” 12 Juni 2025, ”

baru sangat membantu anak mereka untuk masuk ke Pustu dengan lebih mudah. Sebelumnya, orang tua sering mengalami kesulitan saat membawa anak mereka yang penyandang disabilitas ke Pustu. Dengan adanya perbaikan ini, mereka merasa lebih nyaman dan tidak lagi terbebani oleh hambatan fisik yang ada. Pernyataan ini mencerminkan betapa pentingnya aksesibilitas dalam fasilitas kesehatan. Ketika jalur akses dirancang dengan baik, hal ini tidak hanya memudahkan penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran bagi orang tua dan keluarga mereka. Secara keseluruhan, perbaikan ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua anggota masyarakat.

Hasil wawancara dengan pemerintah desa, penyandang disabilitas, serta masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas di Desa Taulo menunjukkan bahwa program perbaikan Pustu yang telah selesai dan digunakan memberikan dampak yang sangat positif bagi semua pihak. Pemerintah desa menekankan pentingnya aksesibilitas bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dan merasa bangga dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Dengan adanya jalur akses yang lebih lebar dan tanjakan, penyandang disabilitas kini dapat memasuki Pustu dengan lebih mudah, menghilangkan kendala yang sebelumnya mereka hadapi. Ruang tunggu yang baru juga memberikan kenyamanan tambahan, sehingga semua pengunjung dapat menunggu dengan tenang saat mendapatkan layanan kesehatan.

Dari perspektif penyandang disabilitas dan keluarga mereka, perbaikan ini sangat dihargai dan dianggap sebagai langkah nyata dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Mereka merasa didengar dan

diperhatikan, berkat keterlibatan mereka dalam musyawarah desa. Harapan mereka adalah agar perbaikan ini menjadi contoh untuk fasilitas umum lainnya di desa, sehingga semua warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati layanan yang setara dan ramah. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas di Pustu, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian dalam masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua.

Perberdayaan penyandang disabilitas melalui program perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) berfokus pada peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, program ini juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi sosial dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yang pada gilirannya mengurangi stigma negatif, dan dengan adanya fasilitas yang lebih baik, penyandang disabilitas merasa lebih dihargai dan diperhatikan, yang meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk mencari layanan kesehatan.

Program perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Taulo bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah desa berperan penting dalam merancang dan melaksanakan program yang inklusif, serta melibatkan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Penyandang disabilitas merasa senang dengan perubahan yang dilakukan di Pustu. Jalur akses yang lebih lebar dan ruang tunggu yang nyaman membuat mereka merasa lebih dihargai dan diperhatikan. Hal ini juga meningkatkan motivasi mereka untuk mencari layanan kesehatan. program perbaikan Pustu di Desa Taulo menunjukkan dampak positif

dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Program ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian dalam masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua anggota masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang lebih baik, penyandang disabilitas merasa lebih dihargai dan diperhatikan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk mencari layanan kesehatan.

b) Program bantuan PKH

Pemerintah Desa Taulo melaksanakan peran penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Pertama, pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan. Mereka melakukan identifikasi dan pendataan terhadap penyandang disabilitas di desa, memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang tepat terhadap program PKH. Dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pendataan, pemerintah desa dapat memahami kebutuhan spesifik mereka dan memberikan bantuan yang sesuai.

Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai program PKH kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan keluarganya. Mereka mengadakan pertemuan dan musyawarah untuk menjelaskan manfaat program, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta cara mendaftar. Dengan cara ini, pemerintah desa tidak hanya membantu penyandang disabilitas mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga

memberdayakan mereka untuk lebih mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi di desa. Melalui upaya ini, pemerintah desa Taulo berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Hasil wawancara oleh Bapak Zulkarnain kana selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Enrekang menyatakan bahwa:

“kami berperan dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas di Desa Taulo mendapatkan akses yang adil terhadap program PKH. Kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melakukan pendataan dan identifikasi penyandang disabilitas yang berhak menerima bantuan.”⁸⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kami berusaha memastikan penyandang disabilitas di Desa Taulo mendapatkan akses yang adil ke program Program Keluarga Harapan (PKH). Kami bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mendata dan mengidentifikasi penyandang disabilitas yang berhak menerima bantuan. Dengan melakukan pendataan ini, kami ingin memastikan bahwa semua penyandang disabilitas yang memenuhi syarat bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Kerja sama dengan pemerintah desa sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas di desa ini. Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan pentingnya akses yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Tasryf Selaku Kaur Pemerintahan Desa Taulo mengatakan bahwa:

⁸⁶ Bapak Zulkarnain Kana, “Wawancara Oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Enrekang” 11 Juni 2025,”

“Peran kami adalah sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dan Dinas Sosial. Kami melakukan pendataan dan identifikasi penyandang disabilitas di desa untuk memastikan mereka mendapatkan akses yang tepat terhadap program PKH.”⁸⁷

Hasil wawancara tersebut menjelaskan peran kami sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dan Dinas Sosial. Kami mendata dan mengidentifikasi penyandang disabilitas di desa agar mereka bisa mendapatkan akses yang tepat ke program Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan melakukan pendataan ini, kami ingin memastikan bahwa semua penyandang disabilitas yang memenuhi syarat bisa menerima bantuan yang mereka butuhkan. Peran kami sangat penting untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan dukungan dari program pemerintah dan memastikan akses yang adil bagi semua orang. Adapun hasil wawancara oleh Syukur (Penyandang Disabilitas Intelektual) di Desa Taulo mengatakan bahwa:

“Bantuan yang saya terima dari PKH telah membantu keluarga saya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan dan obat-obatan. Program ini juga memberikan dukungan moral bagi saya dan keluarga, karena kami merasa diperhatikan dan didukung oleh pemerintah. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari program ini.”⁸⁸

⁸⁷ Bapak Tasrif, “Wawancara Oleh Kaur Pemerintahan Desa Taulo” 10 Juni 2025.”

⁸⁸ Syukur, “Wawancara Oleh Penyandang Disabilitas Intelektual” 12 Juni 2025,”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan betapa pentingnya bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga responden. Mereka mengatakan bahwa bantuan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan dan obat-obatan. Selain itu, responden merasa bahwa program ini memberikan dukungan moral. Merasa diperhatikan dan didukung oleh pemerintah membuat mereka merasa lebih nyaman. Rasa syukur yang diungkapkan menunjukkan betapa besar dampak positif yang dirasakan oleh keluarga mereka dari program ini. Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan pentingnya program PKH dalam membantu keluarga yang membutuhkan, baik dari segi materi maupun dukungan emosional. Program ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan memberikan harapan bagi mereka yang terlibat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu orang tua dari penerima bantuan Ibu Suriati bahwa:

“Bantuan dari PKH ini sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manfaatnya sangat besar, karena dengan bantuan ini, kami bisa membeli kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga kami. Selain itu, bantuan ini memberikan kami rasa aman dan stabilitas, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit.”⁸⁹

Hasil wawancara menunjukkan betapa bermanfaatnya bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) bagi keluarga responden. Mereka mengatakan bahwa bantuan ini membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti

⁸⁹ Ibu Suharti, “Wawancara Oleh Orang Tua Penerima Bantuan” 12 Juni 2025,”

makanan, obat-obatan, dan kebutuhan penting lainnya. Ini menunjukkan bahwa program ini penting untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kami juga merasa bahwa bantuan ini memberikan rasa aman dan stabilitas, terutama saat ekonomi sulit. Rasa aman ini membantu mereka merasa lebih tenang dalam menghadapi masalah sehari-hari. Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan dampak positif dari program PKH dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Bantuan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan stabilitas.

Perberdayaan penyandang disabilitas melalui program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dukungan finansial kepada penyandang disabilitas dan keluarganya,yang dilaksanakan di Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Dengan mendapatkan bantuan, penyandang disabilitas dan keluarganya merasa lebih mandiri dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi di Desa, mendapatkan rasa diperhatikan dan didukung oleh pemerintah melalui program ini memberikan dukungan emosional yang penting bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.

Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Taulo berperan penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada penyandang disabilitas dan keluarganya, serta memastikan akses yang adil terhadap bantuan yang tersedia. Pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan. Mereka melakukan identifikasi dan pendataan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang tepat terhadap program PKH. Hal ini membantu

memahami kebutuhan spesifik penyandang disabilitas dan memberikan bantuan yang sesuai. program PKH di Desa Tauло menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan keluarganya. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan meningkatkan partisipasi sosial dan ekonomi mereka dalam masyarakat. Dengan demikian, PKH berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas.

c) Bantuan Dari Organisasi

Peran pemerintah desa Tauло dalam pemberdayaan penyandang disabilitas sangat penting, terutama melalui program bantuan alat cukur rambut yang berkolaborasi dengan organisasi ikatan difabel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berkontribusi secara ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Melalui kolaborasi ini, pemerintah desa juga dapat memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik. Hasil wawancara oleh Syukur Ketua Organisasi Ikatan Difabel Enrekang menyatakan bahwa:

“Program bantuan alat cukur rambut ini merupakan salah satu inisiatif kami untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Desa Tauло. Kami percaya bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki potensi untuk mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat.”⁹⁰

⁹⁰ Syukur, “Wawancara Oleh Ketua Organisasi Ikatan Difabel Enrekang” 13 Juni 2025,”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa program bantuan alat cukur rambut adalah cara untuk membantu penyandang disabilitas di Desa Tauло. Program ini bertujuan agar penyandang disabilitas bisa mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki potensi untuk berkontribusi. Dengan memberikan alat cukur rambut, program ini tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk belajar keterampilan dan mendapatkan penghasilan. Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan pentingnya memberdayakan penyandang disabilitas dan memberi mereka kesempatan untuk aktif dalam komunitas. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian mereka. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Organisasi Ikatan Difabel Enrekang yang mengatakan bahwa:

“Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada penyandang disabilitas dalam bidang cukur rambut. Dengan keterampilan ini, mereka dapat membuka usaha sendiri dan meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dan mengurangi stigma yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memberikan keterampilan cukur rambut kepada penyandang disabilitas. Dengan keterampilan ini, mereka diharapkan dapat membuka usaha sendiri dan meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas. Dengan memiliki keterampilan dan usaha, mereka dapat merasa lebih mandiri dan

berharga. Program ini juga berusaha mengurangi stigma yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat diterima lebih baik dalam masyarakat. Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan pentingnya program ini dalam membantu penyandang disabilitas tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dalam meningkatkan kepercayaan diri dan mengubah pandangan masyarakat terhadap mereka. Adapun hasil wawancara oleh Saidul (Penyandang Disabilitas Fisik) di Desa Taulo mengatakan bahwa:

“Saya sangat bersyukur bisa menerima bantuan ini. Sebelumnya, saya tidak memiliki alat cukur rambut dan merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan bantuan ini, saya merasa lebih percaya diri untuk memulai usaha cukur rambut sendiri.”⁹¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa responden sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Sebelumnya, ia tidak memiliki alat cukur rambut, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan bantuan ini, ia merasa lebih percaya diri untuk memulai usaha cukur rambut sendiri. Pernyataan ini menunjukkan dampak positif dari bantuan tersebut. Dengan alat cukur yang diberikan, ia kini bisa mengembangkan keterampilan dan mendapatkan penghasilan. Rasa percaya diri yang meningkat juga menunjukkan bahwa bantuan ini tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang penting. Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan betapa pentingnya bantuan ini dalam membantu individu untuk

⁹¹ Saidul, “Wawancara Oleh Penyandang Disabilitas Fisik” 12 Juni 2025.”

mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat. Hasil wawancara oleh ibu saidah Masyarakat Desa Taulo mengatakan bahwa:

“Usaha ini telah menarik perhatian banyak orang di lingkungan kami. Banyak tetangga yang datang untuk mencoba jasa cukur rambutnya. Saya melihat bahwa Saidul sangat terampil dan ramah, sehingga pelanggan merasa nyaman. Ini juga membantu mengubah pandangan masyarakat tentang penyandang disabilitas.”⁹²

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa usaha cukur rambut yang dijalankan oleh Saidul telah menarik perhatian banyak orang di lingkungan sekitarnya. Banyak tetangga yang datang untuk mencoba jasanya. Saya melihat bahwa Saidul sangat terampil dan ramah, sehingga pelanggan merasa nyaman. Pernyataan ini menunjukkan bahwa usaha ini tidak hanya berhasil secara ekonomi, tetapi juga membantu mengubah pandangan masyarakat tentang penyandang disabilitas. Dengan menunjukkan keterampilan dan sikap ramah, Saidul membantu menghilangkan stigma negatif yang sering ada. Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan dampak positif dari usaha cukur rambut ini, baik dalam menarik pelanggan maupun dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas.

Program bantuan alat cukur rambut yang berkolaborasi dengan organisasi ikatan difabel bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian penyandang disabilitas. Dengan memiliki keterampilan dan alat yang diperlukan, penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara ekonomi, yang meningkatkan

⁹² Qadri, “Wawancara Oleh Sekretaris Organisasi Ikatan Difabel Enrekang” 13 Juni 2025,”

kemandirian mereka, usaha yang dijalankan oleh penyandang disabilitas membantu mengubah pandangan masyarakat tentang mereka, mengurangi stigma negatif, dan meningkatkan penerimaan sosial.

Program bantuan alat cukur rambut yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Taulo, bekerja sama dengan organisasi Ikatan Difabel, bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui peningkatan keterampilan dan kemandirian. Program ini tidak hanya memberikan alat cukur rambut, tetapi juga membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk belajar keterampilan baru dan berkontribusi secara ekonomi dalam masyarakat. Usaha cukur rambut yang dijalankan oleh penyandang disabilitas, seperti Saidul, telah menarik perhatian masyarakat dan membantu mengubah stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Keterampilan dan sikap ramah mereka membuat pelanggan merasa nyaman, yang berkontribusi pada penerimaan sosial yang lebih baik.

d) Hambatan Dan Tantangan

Hasil wawancara oleh Bapak Zulkarnain Kana selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Enrekang menyatakan bahwa:

“Salah satu hambatan utama yang kami hadapi adalah keterbatasan anggaran. Sumber daya yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk menjalankan program-program yang kami rencanakan. Selain itu, kami

juga menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas fasilitas publik yang belum sepenuhnya ramah disabilitas.”⁹³

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran. Sumber daya yang ada sering kali tidak cukup untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Selain itu, tantangan lainnya, yaitu aksesibilitas fasilitas publik yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Hal ini menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan dan fasilitas yang mereka butuhkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masalah anggaran dan aksesibilitas menjadi penghalang dalam pelaksanaan program yang bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Jika kedua masalah ini dapat diatasi, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi penyandang disabilitas. Adapun hasil wawancara oleh Ibu Rahmaniari Z, S.Pd mengatakan bahwa:

“Stigma sosial memang menjadi tantangan yang signifikan. Banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas, yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam program-program pemberdayaan. Kami berusaha untuk mengedukasi masyarakat melalui kampanye kesadaran dan sosialisasi.”⁹⁴

⁹³ Bapak Zulkarnain Kana, “Wawancara Oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Enrekang” 11 Juni 2025.”

⁹⁴ S.Pd Ibu Rahmaniari Z, “Wawancara Oleh Kaur Perencanaan Di Desa Taulo” 10 Juni 2025,”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa stigma sosial adalah tantangan besar bagi penyandang disabilitas. Banyak orang masih memiliki pandangan negatif terhadap mereka, yang menghambat partisipasi dalam program-program pemberdayaan. Untuk mengatasi masalah ini, kami berusaha mengedukasi masyarakat melalui kampanye kesadaran dan sosialisasi. Tujuannya adalah untuk mengubah pandangan negatif dan meningkatkan pemahaman tentang kemampuan penyandang disabilitas. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dengan mengurangi stigma, diharapkan penyandang disabilitas dapat lebih aktif berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang mendukung mereka. Adapun hasil wawancara oleh Syukur selaku Ketua Organisasi Ikatan Difabel Kab. Enrekang menyatakan bahwa:

“Salah satu hambatan utama yang kami hadapi adalah kurangnya dukungan finansial. Banyak program yang kami rencanakan terhambat karena keterbatasan anggaran. Kami juga sering kali kesulitan dalam mendapatkan sponsor atau donatur yang bersedia mendukung kegiatan kami.”⁹⁵

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya dukungan finansial. Banyak program yang direncanakan terhambat karena anggaran yang terbatas. Kami juga kesulitan dalam mendapatkan sponsor atau donatur yang mau mendukung kegiatan mereka. Hal ini membuat pelaksanaan program-program yang bermanfaat bagi

⁹⁵ Syukur, “Wawancara Oleh Ketua Organisasi Ikatan Difabel Enrekang” 13 Juni 2025.”

penyandang disabilitas menjadi sulit. Pernyataan ini menunjukkan bahwa masalah keuangan menghalangi inisiatif yang dapat membantu penyandang disabilitas. Jika dukungan finansial bisa ditingkatkan, program-program tersebut dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar.

C. Hasil Pemberdayaan Yang Dilakukan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, seperti alat cukur rambut, telah memberikan dampak positif yang besar dalam meningkatkan kemandirian mereka. Dengan alat yang tepat, penyandang disabilitas dapat menjalankan usaha cukur rambut sendiri. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri. Mereka merasa lebih berdaya dan mampu berkontribusi dalam masyarakat, yang sebelumnya mungkin sulit dilakukan. Pelatihan yang diberikan bersama bantuan tersebut juga membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha, membuka peluang baru untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dampak positif lainnya adalah peningkatan partisipasi sosial penyandang disabilitas dalam komunitas. Dengan usaha yang mereka jalankan, mereka kini lebih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, yang membantu membangun hubungan dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat. Dukungan dari masyarakat juga semakin meningkat, yang membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Keberhasilan mereka dalam menjalankan usaha tidak hanya menginspirasi penyandang disabilitas lainnya, tetapi juga membantu mengurangi stigma negatif, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua.

Hasil wawancara oleh saidul (Penyandang Disabilitas Fisik) di Desa Taulo mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah luar biasa. Sejak dapat alat cukur beberapa bulan lalu sampai sekarang saya bisa dapat penghasilan dari bantuan tersebut. Sekarang saya lebih sering diajak ngobrol sama tetangga. Mereka datang bukan cuma untuk cukur rambut, tapi juga sekedar bersosialisasi. Anak-anak muda di sini juga mulai berani berinteraksi dengan saya.”⁹⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerima bantuan merasa sangat bersyukur dan senang dengan alat cukur yang diberikan. Sejak mendapatkan alat tersebut beberapa bulan lalu, mereka bisa menghasilkan uang dari usaha cukur rambut. Selain manfaat finansial, ada juga perubahan positif dalam interaksi sosial. Penerima bantuan mengatakan bahwa sekarang mereka lebih sering diajak ngobrol oleh tetangga. Orang-orang datang tidak hanya untuk mencukur rambut, tetapi juga untuk bersosialisasi. Ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan komunitas. Penerima bantuan juga mencatat bahwa anak-anak muda di lingkungan mereka mulai berani berinteraksi, yang sebelumnya tidak terjadi. Ini menunjukkan bahwa bantuan tersebut tidak hanya memberikan kemandirian finansial, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan keterlibatan sosial mereka dalam masyarakat. Adapun hasil wawancara mengenai pesan dari Saidul (Penyandang Disabilitas Fisik) di Desa Taulo menyatakan bahwa:

⁹⁶ Saidul, “Wawancara Oleh Penyandang Disabilitas Fisik” 12 Juni 2025.”

“Jangan takut mencoba! Awalnya saya juga ragu bisa melakukannya. Ternyata dengan dukungan yang tepat dan kemauan, kita pun bisa berhasil. Sekarang hidup saya jauh lebih berarti.”⁹⁷

Adapun hasil wawancara oleh Orang Tua penyandang disabilitas ibu Suharni menyatakan bahwa:

“Sejak anak saya mendapatkan alat cukur, banyak perubahan positif yang terjadi. Dia kini lebih mandiri dan bersemangat menjalankan usaha cukur rambutnya. Penghasilannya juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Saya merasa sangat bangga. Dulu, dia sering merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Sekarang, dia lebih percaya diri dan berani berinteraksi dengan orang lain. Ini sangat berarti bagi kami sebagai keluarga”⁹⁸

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pemberian alat cukur kepada anak saya telah membawa dampak yang sangat positif. Dari kemandirian dan semangat berwirausaha hingga peningkatan kepercayaan diri dan kontribusi ekonomi, semua ini menciptakan perubahan yang berarti dalam hidupnya dan memberikan dampak positif bagi seluruh keluarga. Hasil wawancara oleh Masyarakat Desa Taulo Ibu Hadasia yang menyatakan bahwa:

⁹⁷ Saidul, “Wawancara Oleh Penyandang Disabilitas Fisik” 12 Juni 2025,”

⁹⁸ Ibu Suharni, “Wawancara Oleh Salah Satu Orang Tua Penyandang Disabilitas Di Desa Taulo” 12 Juni 2025.”

“saya melihat penyandang disabilitas yang telah menjalankan usaha cukur rambutnya merasa sangat bangga karena mereka lebih percaya diri dan aktif berinteraksi dengan orang lain”⁹⁹

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa usaha cukur rambut yang dijalankan oleh penyandang disabilitas telah membawa dampak positif yang signifikan. Dari kebanggaan dan kepercayaan diri yang meningkat hingga interaksi sosial yang lebih aktif, semua ini menciptakan perubahan yang berarti dalam hidup mereka. Usaha ini tidak hanya memberdayakan individu, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Hasil wawancara oleh ketua Organisasi Difabel Enrekang menyatakan bahwa:

“Kami sangat senang melihat perkembangan mereka. Warga yang menerima bantuan kini lebih percaya diri dan aktif menjalankan usaha mereka. Mereka tidak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga berinteraksi lebih banyak dengan masyarakat. Ini sangat positif untuk integrasi sosial”

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan kepada warga telah membawa dampak yang sangat positif. Dari peningkatan kepercayaan diri dan keterampilan hingga interaksi sosial yang lebih aktif dan integrasi yang lebih baik dalam masyarakat, semua ini menciptakan perubahan yang berarti. Bantuan tersebut tidak hanya memberikan dukungan ekonomi, tetapi juga memberdayakan individu untuk berkontribusi secara positif dalam

⁹⁹ Ibu Hadasia, “Wawancara Oleh Masyarakat Desa Taulo” 12 Juni 2025.”

komunitas mereka. Adapaun hasil wawancara oleh Bapak Muh Yusran, S.Pd menyatakan bahwa:

“Dampaknya sangat besar. Masyarakat menjadi lebih menghargai penyandang disabilitas dan melihat mereka sebagai bagian yang penting dari komunitas. Interaksi sosial meningkat, dan stigma negatif mulai berkurang. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung.”¹⁰⁰

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan kepada warga telah membawa dampak yang sangat positif. Dari peningkatan kepercayaan diri dan keterampilan hingga interaksi sosial yang lebih aktif dan integrasi yang lebih baik dalam masyarakat, semua ini menciptakan perubahan yang berarti. Bantuan tersebut tidak hanya memberikan dukungan ekonomi, tetapi juga memberdayakan individu untuk berkontribusi secara positif dalam komunitas mereka.

Sebelum menerima bantuan dari pemerintah desa Taulo, penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan kurangnya dukungan untuk mengembangkan potensi mereka. Banyak dari mereka yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara ekonomi. Program bantuan seperti infrastruktur yang lebih baik, Program Keluarga Harapan (PKH), dan alat cukur rambut tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

¹⁰⁰ Bapak Yusran S.E, “Wawancara Oleh Sekretaris Desa Taulo” 10 Juni 2025.”

Setelah mendapatkan bantuan, penyandang disabilitas mengalami perubahan yang signifikan. Infrastruktur yang lebih baik memudahkan mereka untuk menjalankan usaha dan berinteraksi dengan masyarakat. Program PKH memberikan dukungan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, sementara alat cukur rambut memungkinkan mereka untuk membuka usaha sendiri. Hasilnya, mereka kini lebih mandiri, percaya diri, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi desa. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan individu penyandang disabilitas, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan stigma negatif dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan saling mendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, seperti alat cukur rambut, telah memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka. Dengan alat yang tepat, penyandang disabilitas dapat menjalankan usaha cukur rambut sendiri, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan interaksi sosial dengan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerima bantuan merasa lebih dihargai dan berdaya, serta mampu berkontribusi dalam komunitas. Dukungan dari masyarakat juga meningkat, membantu mengurangi stigma negatif dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.

Selain itu, program bantuan lainnya, seperti perbaikan infrastruktur dan Program Keluarga Harapan (PKH), turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas. Dengan infrastruktur yang lebih baik, mereka dapat lebih mudah menjalankan usaha dan berinteraksi dengan masyarakat. Program PKH memberikan dukungan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari,

sehingga mereka merasa lebih mandiri dan aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi desa. Secara keseluruhan, perubahan ini tidak hanya menguntungkan individu penyandang disabilitas, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan stigma dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan saling mendukung.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa Taulo telah menunjukkan peran penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas melalui berbagai inisiatif. Program-program yang dijalankan, seperti perbaikan aksesibilitas fasilitas kesehatan (Pustu), penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan pemberian pelatihan keterampilan seperti cukur rambut, secara nyata telah meningkatkan kemandirian ekonomi, kepercayaan diri, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas. Upaya ini juga berhasil mengurangi stigma negatif dan mendorong terciptanya lingkungan desa yang lebih inklusif dan suportif.

Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan stigma sosial masih menjadi hambatan. Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada perencanaan yang matang, partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Dampak positif yang dirasakan, mulai dari peningkatan kualitas hidup hingga integrasi sosial yang lebih baik, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kebutuhan dan partisipatif adalah kunci dalam pemberdayaan disabilitas.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Taulo, disarankan agar pemerintah desa terus mengupayakan peningkatan dukungan finansial, baik dari pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah, maupun sektor swasta, guna memastikan keberlanjutan dan perluasan program. Penting juga untuk mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat

luas untuk menghilangkan stigma dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya inklusi. Selain itu, pemerintah desa harus senantiasa melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam setiap tahapan program, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi, agar program yang dirancang benar-benar relevan dan efektif. Perluasan perbaikan aksesibilitas tidak hanya terbatas pada fasilitas kesehatan, tetapi juga mencakup infrastruktur umum lainnya, sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. "Desa Dalam Tinjauan Hukum, Sosial, Dan Ekonomi," 2016, 1–23.
- Afriansyah. *Pengertian Dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat*, 2023.
- Agustina, Elvia, and Tience Debora Valentina. "Penerimaan Diri Penyandang Disabilitas Fisik Pasca-Lahir." *Psychopreneur Journal* 7, no. 1 (2023): 29–45.
- Agustina, Elvia, and Tience Debora Valentina. "Penerimaan Diri Penyandang Disabilitas." *Psychopreneur Journal* 7, no. 1 (2023): 29–45.
- AI Agustina. "Metode Penelitian." *Metode Penelitian*, 2022, 32–41.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiadi. "Metodologi Penelitian Sosial," 2016, 85–89.
- Ashar, Dio, Inatsan Ashila Bestha, and Nadia Pramesa Gita. "Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan," 2019, 1–113.
- Az-Zahra, Afifah, and Almisar Hamid. "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Program Keterampilan Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta Barat." *Journal of Social Work and Social Services*. Vol. 3, 2022.
- Bapak Tasrif. "Wawancara Oleh Kaur Pemerintahan Desa Taulo" 10 Juni 2025,"
- Bapak Yusran S.E. "Wawancara Oleh Sekretaris Desa Taulo" 10 Juni 2025,"
- Bapak Zulkarnain Kana. "Wawancara Oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Enrekang" 11 Juni 2025,"
- Brigette Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04, no. 048 (2002): 243.
- Burhan Bungin (ED). "Metode Penelitian Kualitatif," 2019, 21–32.

- Dedi Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.I. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Dwintari, Julita Widya. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 5, no. 1 (2021): 29–51..
- Emzir. *Medologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Endah, Kiki. "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 135–43.
- Fadillah. "Pengaruh Kualitas Personal Dan Dependability Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Loket Pembayaran Pdam," 2023.
- Fadillah, Aswan, and Khurin'In Ratnasari. "Pemberdayaan Komunitas Anak Jalanan Rermina Tawang Alun Berbasis Kewirausahaan Dan Media Sosial (Entrepreneurship) Di Kabupaten Jember." *Auladuna: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 02 (2024).
- Firdaus, Fakhri Muhammad. "Perkembangan Keagamaan Pada Anak Disabilitas (Studi Deskripsif Pada Anak Tuna Rugu Di SLB Budi Mulia Cililin)." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.
- Ginting, Simson, and Robinson Sembiring. "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kolam Soda Desa Buluh Naman Kecamatan Munte Kabupaten Karo." *Jurnal Pengabdian Nasional*. Vol. 02, 2022.
- Hairani Siregar, Berlianti, Supsiloani, and Indah Permatasari Siregar. "Pemenuhan Hak Sipil Anak Disabilitas Di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 29, no. 4 (2023): 722–29.
- Hilmiah, Dkk. "Analisis Deskriptif Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial," 2019, h.115.
- Ibu Hadasia. "Wawancara Oleh Masyarakat Desa Taulo" 12 Juni 2025,"

Ibu Rahmaniair Z, S.Pd. “*Wawancara Oleh Kaur Perencanaan Di Desa Taulo*” 10 Juni 2025,”

Ibu Suharni. “*Wawancara Oleh Salah Satu Orang Tua Penyandang Disabilitas Di Desa Taulo*” 12 Juni 2025,”

Ibu Suharti. “*Wawancara Oleh Orang Tua Penerima Bantuan*” 12 Juni 2025,”

Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik. “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.” *Sakina: Journal of Family Studies*, 2017.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri,” n.d.

Indonesia, Presiden Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” 2016, 139–41.

Indriawan, Denny, Setya Wahyudi, and Sri Wahyu Handayani. “Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia” 5, no. 4 (2025): 3159–73.

Islam, Anshori Daulatul, Ferry Timorochmadi, M.Y. Fakhrudin, Ricky Yosepty, Teti Ratnawulan, and Neni Sri Rahayu. “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung.” *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (2024): 362–77.

Jaiman, Fitrah. “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Pendidikan Multikultural Di SMP Negeri 7 Mataram,” 2022, 1–23.

Kadir, Abdul. “Studi Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik,” 2017, 108–9.

Kartika, Oleh :, and Gabriela Rompis. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia 1.” *Lex Administratum*, 2016.

Karunia. "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas" 4, no. June (2016): 2016.

Kholik, Nur Alif Abdul. "Pemberdayaan Santri Dalam Public Relations Lembaga Ittihadul Muballighin (LIM) Pondok Pesantren Lirboyo Kediri." *Etheses IAIN Kediri*, 2021, 13.

Margayaningsih, Dwi Iriani. "Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa." *Jurnal Publiciana* 11, no. 1 (2018): 72–88.

Matthew b. Miles, dan A. Michael Huberman. "Analisis Data Kualitatif," 2016, 1–23.

Mekarisce, Arnild Augina. "Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, n.d., 40–46.

Miller, Bob(Postle industries). *Sosiologi Pemerintahan*. Vol. 1, 1987.

Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian," 2011, 32–41.

Mustanir, Ahmad, Muhammad Rais Rahmat Razak, Herman Dema, and Andi Asrifan. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Enrekang." *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información* 4, no. 2 (2021): 2013–15.

Nafiah, UH. "Metode Penelitian." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99.

Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 131.

Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 8, no. 2 (2014): 177–1828.

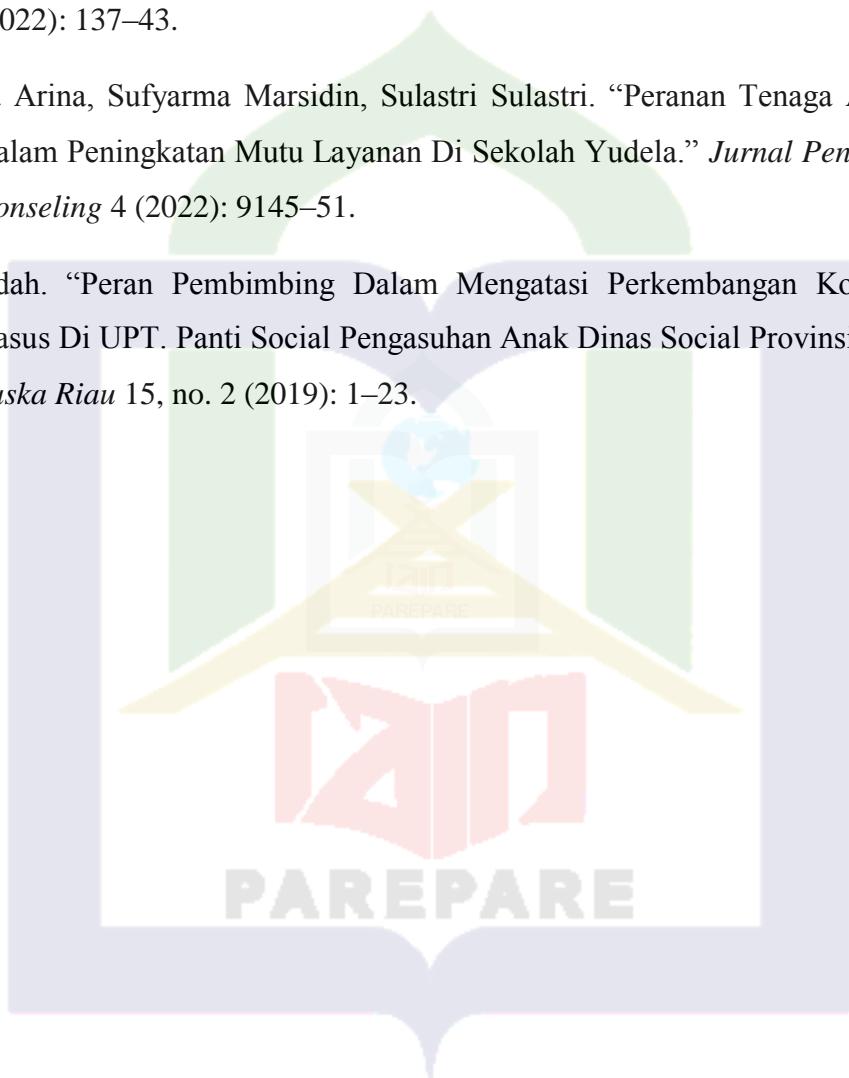
NURDIN, M S ISMAIL. "Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi

- Penyelenggara Pemerintahan,” 2017.
- Nurhakim, Diky, Wahyu Gunawan, and Hery Wibowo. “Fungsi Kelompok Usaha Berkah Bersama (KUBBE) Dalam Pemberdayaan Pemuda.” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 7, no. 2 (2023): 164–77.
- Pawestri, Aprilina. “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional.” *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2017).
- Podding. “Wawancara Oleh Penyandang Disabilitas Fisik 12 Juni 2025,” n.d.
- Priamsari, R R Putri A. “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019): 215–23.
- Qadri. “Wawancara Oleh Sekretaris Organisasi Ikatan Difabel Enrekang” 13 Juni 2025,”
- R. Septianingsih,D. Safitri, S.Sujarwo. “Kebutuhan Dan Srategi Pendampingan Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Mi.” *Cendekia Pendidikan* 1, no. 1 (2023): 1–13.
- RI., Rektorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri. “Masyarakat ASEAN Edisi 1: Mewujudkan Masyarakat ASEAN Yang Dinamis,” n.d.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.
- Riyanti, Chika, and Nurliana Cipta Apsari. “Gambaran Aktualisasi Diri Penyandang Disabilitas Fisik Yang Bekerja.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020): 40.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa*. Perpustakaan Nasional RI, 2022.
- Rusfiana, Yudi, and Cahya Supriatna. “Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan

- Perkembangan.” *Alfabeta Bandung*, 2021, 148.
- Sabardi, Lalu. “Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44Sabardi, no. 2 (2014): 170.
- Saidul. “Wawancara Oleh Penyandang Disabilitas Fisik 12 Juni 2025,” n.d.
- Saleh, Zamharirah, M H Nasri, Fakultas Ushuluddin, Iain Parepare, Dosen Fakultas Ushuluddin, and Iain Parepare. “Development Of Children ’ S Self-Potential Through Majelis Anak Saleh Activities In Parepare City Pendahuluan Pengembangan Potensi Diri Menjadi Bentuk Usaha Untuk Memaksimalkan Sumber Daya Insani , Sehingga Dapat Membangun Masyarakat Islam Lebih Baik Lagi” I (2022): 48–58.
- Salsabila, Nida, Hetty Krisnani, and Nurliana Cipta Apsari. “Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 3 (2019): 190.
- Sholihah, Imas. “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.” *Sosio Informa* 2, no. 2 (2016): 166–84.
- Sigourney, Ruth Bunga. “Uji Keabsahan Data, Content Analysis Dalam Penelitian Kualitatif.” 2022, 2022.
- Simson Ginting, Robinson Sembiring, Arlina, Elita Dewi, Rudi Kristian. “Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kolam Soda Desa Buluh Naman Kecamatan Munte Kabupaten Karo.” *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional* 02, no. 05 (2022): 10–19.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono Guzman, Kurniawan Candra, and Working Oktarina, Nina Paper. “BAB III

- METODE PENELITIAN Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008).” *Economic Education Analysis Journal* 7, no. 1 (2018): 335–36.
- Syahran, Muhammad. “Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23.
- Syamraeni. “Peran Organisasi Ikatan Difabel Enrekang Inklusi Dalam Pemberdayaan Penyandang Difabel Di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang,” 2023.
- Syamsuddin AB. *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*, n.d.
- Syukur. “Wawancara Oleh Ketua Organisasi Ikatan Difabel Enrekang” 13 Juni 2025,”
- “Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” 2016.
- Unique, Aflii. “Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm): Inventarisasi Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.” *Seminar Nasional Biotik*, no. 0 (2023): 1–23.
- Wagisri, Nopriawan Mahriadi, Siti Lady Havivi, Dkk. “Motivasi Dan Bimbingan Bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Di Kota Palembang” 5, no. 1 (n.d.): 77–86.
- Wiarti, July. “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 87–109.
- Wicaksana, Arif, and Tahar Rachman. “Konsep Ilmu Pemerintahan.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27.
- Widianto, Rizky Ika. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Program

- Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas,” 2018.
- Wirawan, Riska, Ika Nur Afni, and Liliek Winarni. “Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas Di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo.” *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 19, no. 2 (2022): 137–43.
- Yudela Arina, Sufyarma Marsidin, Sulastri Sulastri. “Peranan Tenaga Administrasi Dalam Peningkatan Mutu Layanan Di Sekolah Yudela.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 9145–51.
- Zamrodah. “Peran Pembimbing Dalam Mengatasi Perkembangan Kognitif Studi Kasus Di UPT. Panti Social Pengasuhan Anak Dinas Social Provinsi Riau.” *UIN Suska Riau* 15, no. 2 (2019): 1–23.





Lampiran 1. Instrumen Penelitian



NAMA MAHASISWA : USWAHTUN HASANA
 NIM : 2120203870231004
 FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
 PRODI : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
 JUDUL : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
 PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
 DI DESA TAULO KECAMATAN ALLA
 KABUPATEN ENREKANG

PEDOMAN WAWANCARA

Penyandang Disabilitas

1. Apa ada bantuan dari dinsos atau Instansi lain dari kabupaten Enrekang kepada penyandang disabilitas? Kalau ada seperti apa bantuan tersebut
2. Menurut bpk/ibu bagaimana dalam hal akses untuk sarana dan prasarana umum apakah ada yang diberikan khusus bagi penyandang?
3. Apakah Ibu/Bapak pernah mengikuti program pemberdayaan dari pemerintah

- desa?
4. Apakah pernah mendapatkan bantuan alat bantu dari pemerintah desa?
 5. Apakah pernah ada sosialisasi atau konsultasi khusus untuk penyandang disabilitas?

Pemerintahan Desa

1. Bagaimana proses pendataaan yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas?
2. Berapa jumlah penyandang disabilitas di Desa Taulo? Sertakan bukti datanya!
3. Apakah ada bentuk-bentuk pemberdayaan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas? Jika ada seperti apa bentuk pemberdayaan tersebut!
4. Bagaimana dengan bantuan yang diberikan kepada para penyandang, bantuan seperti apa yang sudah tersalurkan kepada para penyandang disabilitas?
5. Bagaimana hasil pemberdayaan yang telah diberikan kepada penyandang disabilitas? Apakah membawa perubahan terhadap penyandang disabilitas?

Pemerintah Dinas Sosial

1. Apa bentuk dukungan atau kolaborasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa Taulo?
2. Apakah Dinas Sosial memberikan pelatihan atau pendampingan khusus kepada aparatur desa terkait pemberdayaan disabilitas?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan atau pemantauan dari Dinas Sosial terhadap program pemberdayaan disabilitas yang dilakukan di desa?
4. Apa saja program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk penyandang disabilitas di Desa Taulo?
5. Bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut?

Masyarakat Desa Taulo

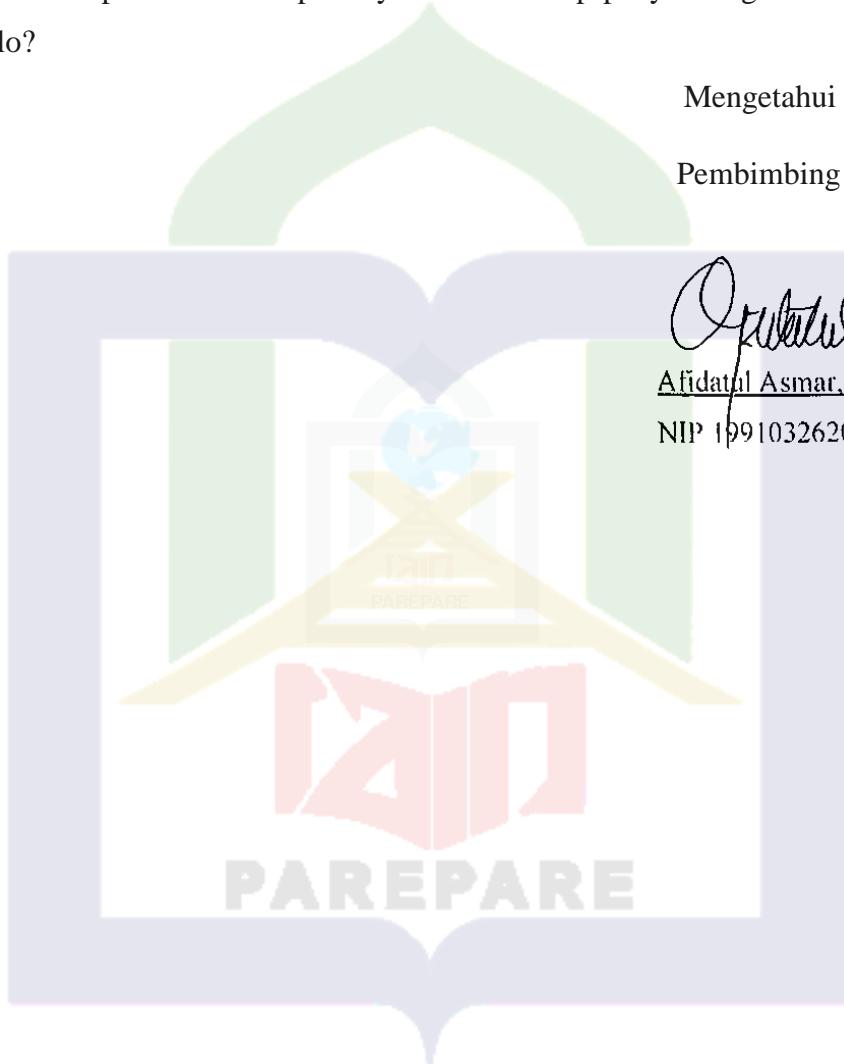
1. Menurut pengamatan Anda, apakah penyandang disabilitas di desa ini menjadi lebih mandiri atau lebih aktif dalam kegiatan masyarakat?
2. Menurut Anda, apa yang masih perlu ditingkatkan dari upaya pemerintah desa dalam memberdayakan penyandang disabilitas?

3. Apakah Anda melihat adanya bantuan atau fasilitas yang diberikan pemerintah desa kepada warga penyandang disabilitas?
4. Menurut Anda, sejauh mana pemerintah desa terlibat dalam mendukung kehidupan atau kebutuhan penyandang disabilitas di desa ini?
5. Bagaimana perubahan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas di Desa Tauol?

Mengetahui

Pembimbing Utama


Afidatul Asmar, M.Sos
NIP 1991032620901005



Lampiran 2. Permohonan Izin Meneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1290/ln.39/FUAD.03/PP.00.9/06/2025

02 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Daerah Kabupaten Enrekang
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Enrekang
 di
 KAB. ENREKANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	USWAHTUN HASANA
Tempat/Tgl. Lahir	:	MALELE, 07 September 2002
NIM	:	2120203870231004
Fakultas / Program Studi	:	Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	MALELE DESA TAULO KEC. ALLA KAB. ENREKANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Daerah Kabupaten Enrekang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DESA TAULO KEC. ALLA KAB. ENREKANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 Juni 2025 sampai dengan tanggal 02 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 4. Surat Selesai Meneliti



**PEMRINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN ALLA
DESA TAULO**

Alamat Jl. Poros Tauло - Malele No. : 01 Telp. 0852 5626 3897 Kode Pos 91754

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Nomor : 000/155/DT/VII/2025

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama	: HERMAN.SE
Jabatan	: Kepala Desa Tauло

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a	: USWAHTUN HASANAH
Tempat /Tgl. Lahir	: Malele, 07 September 2002
NIM	: 2120203870231004
Fakultas/Prodi	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah/Pengembangan Masyarakat Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Dusun Malele Kalaja, Desa Tauло, Kec. Alla Kab. Enrekang

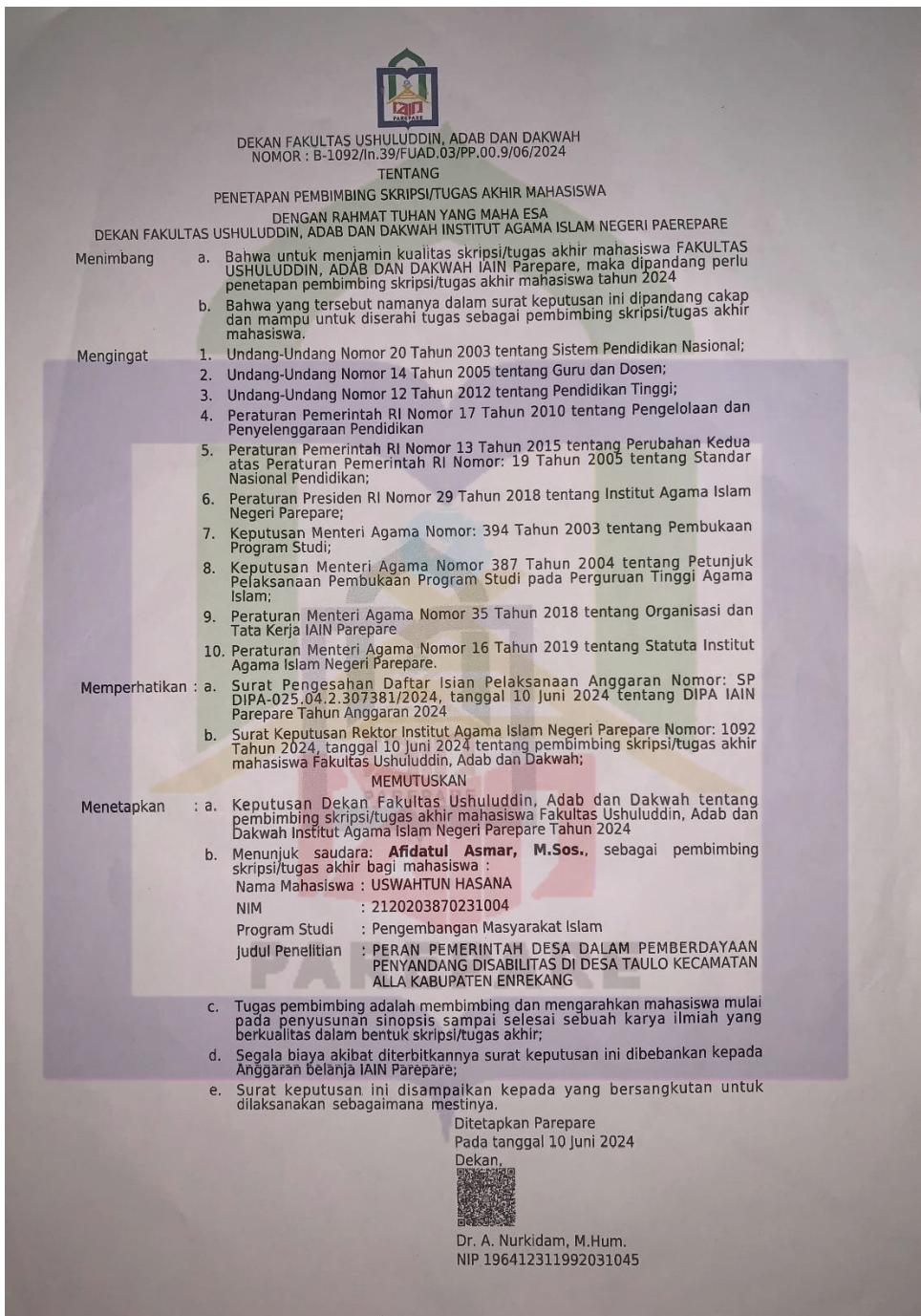
Benar-benar telah Melaksanakan Penelitian Di Desa Tauло, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul : " *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Tauло Kec. Alla.Kab.Enrekang* " yang Dilaksanakan Mulai Tanggal 02 Juni 2025 s/d 02 Juli 2025

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tauло, 08 Juli 2025
Kepala Desa Tauло

HERMAN. SE

Lampiran 5. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Muh. Yusran, S.E
Alamat	: Malele
Jenis Kelamin	: Laki - Laki

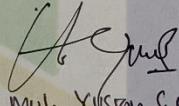
Menerangkan bahwa

Nama	: Uswahtun Hasana
Nim	: 2120203870231004
Perguruan Tinggi	: IAIN Parepare
Fakultas/Prodi	: FUAD/ Pengembangan Masyarakat Islam

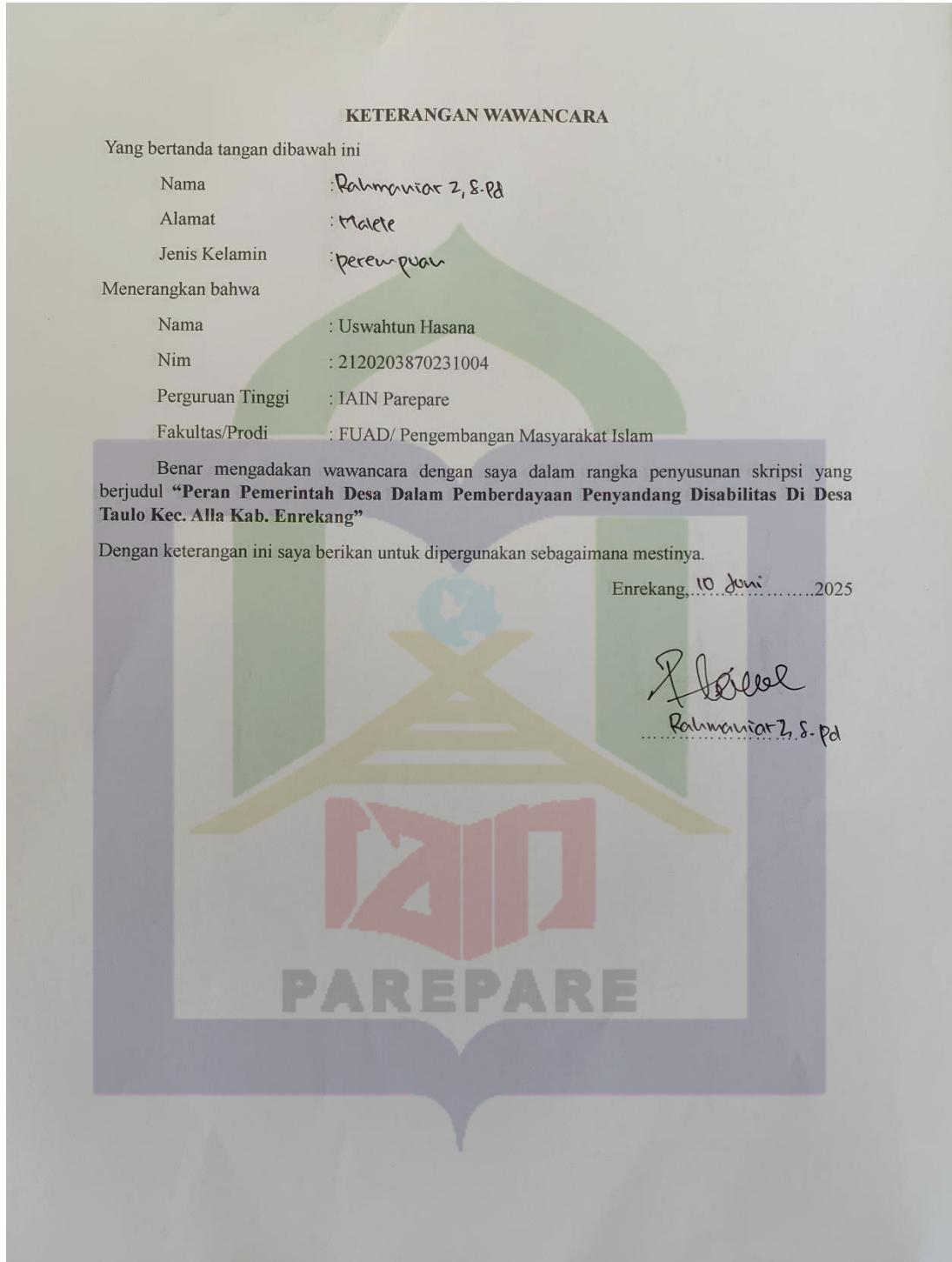
Benar mengadakan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Tauko Kec. Alla Kab. Enrekang”**

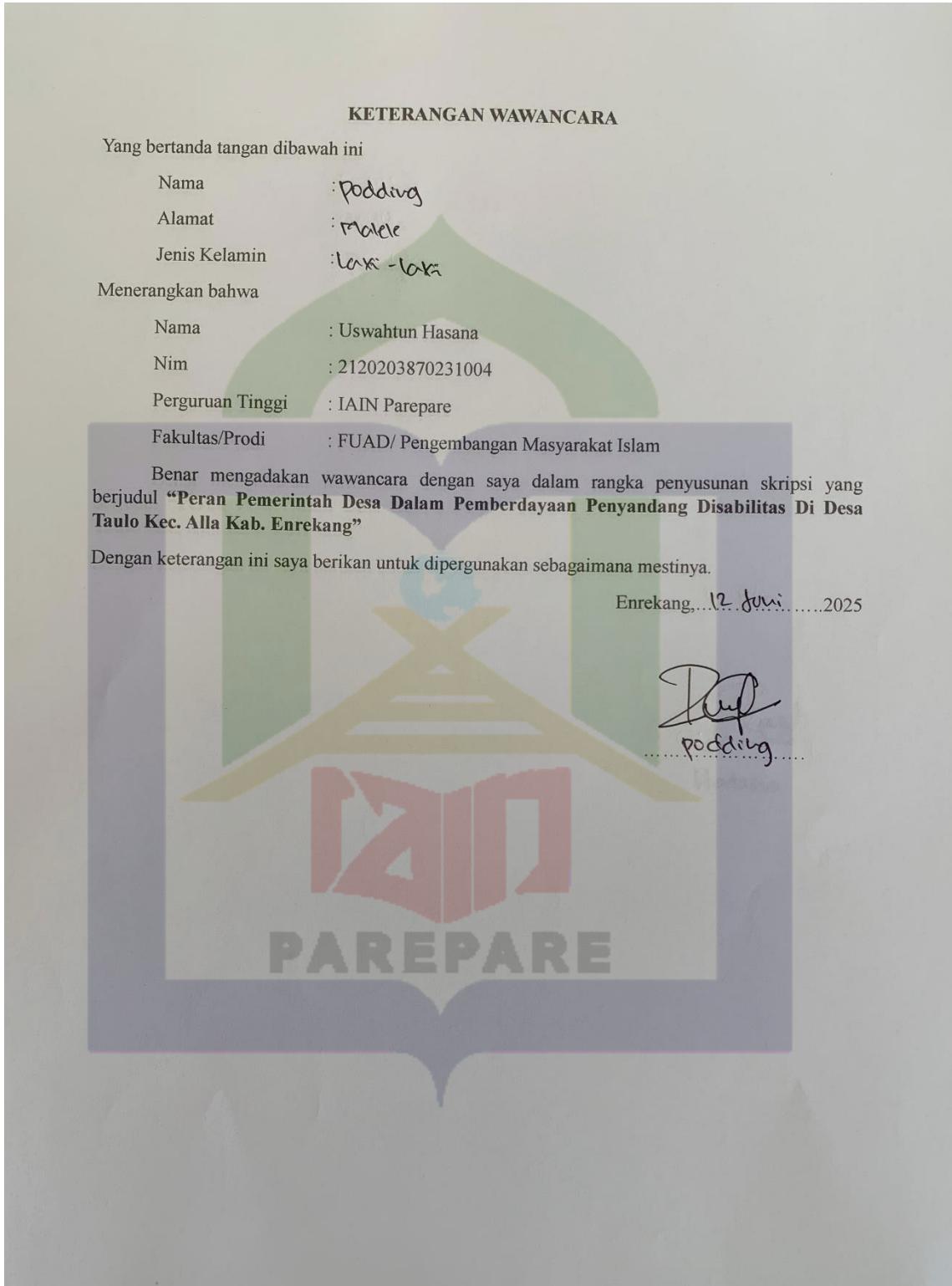
Dengan keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

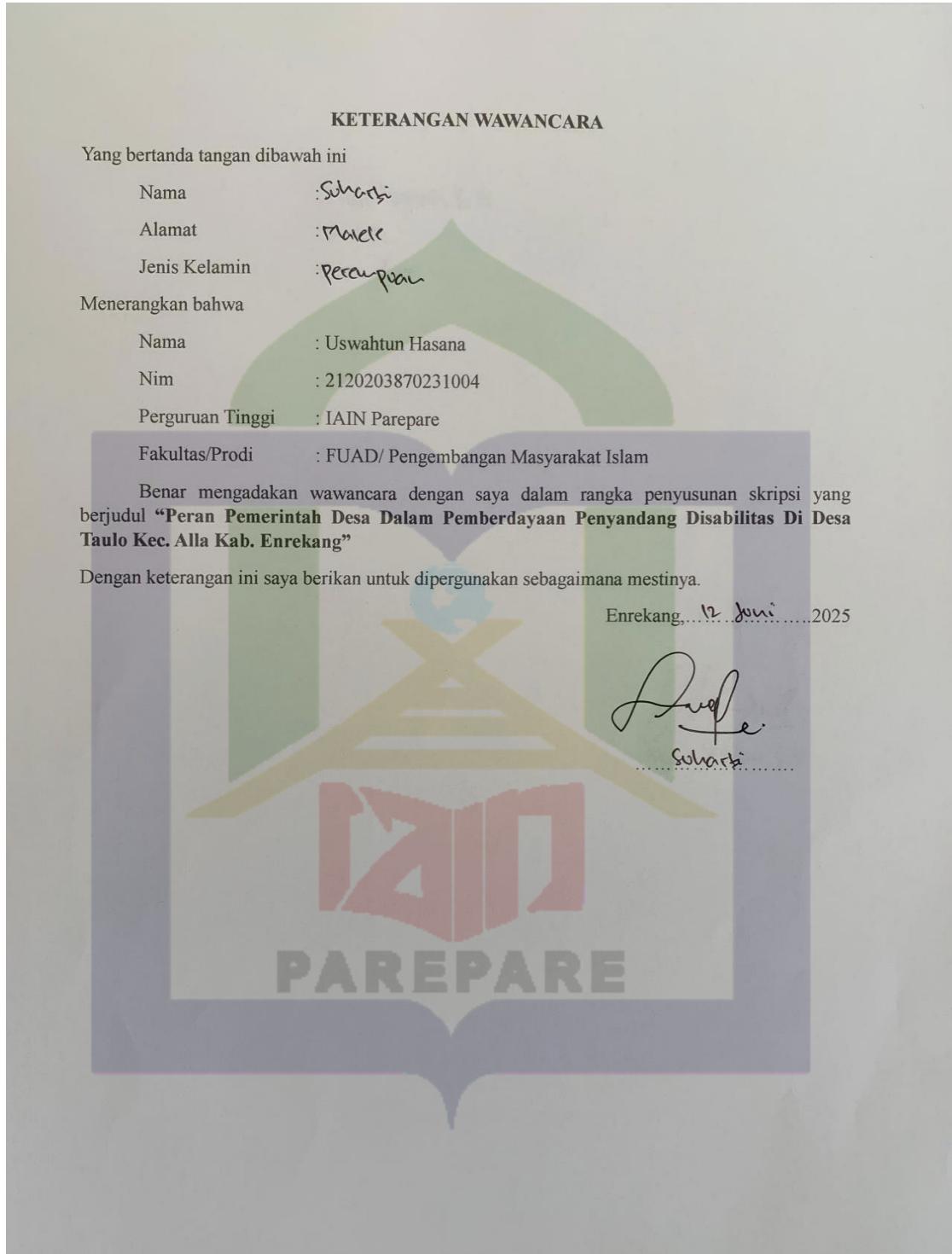
Enrekang, 10 Juni 2025

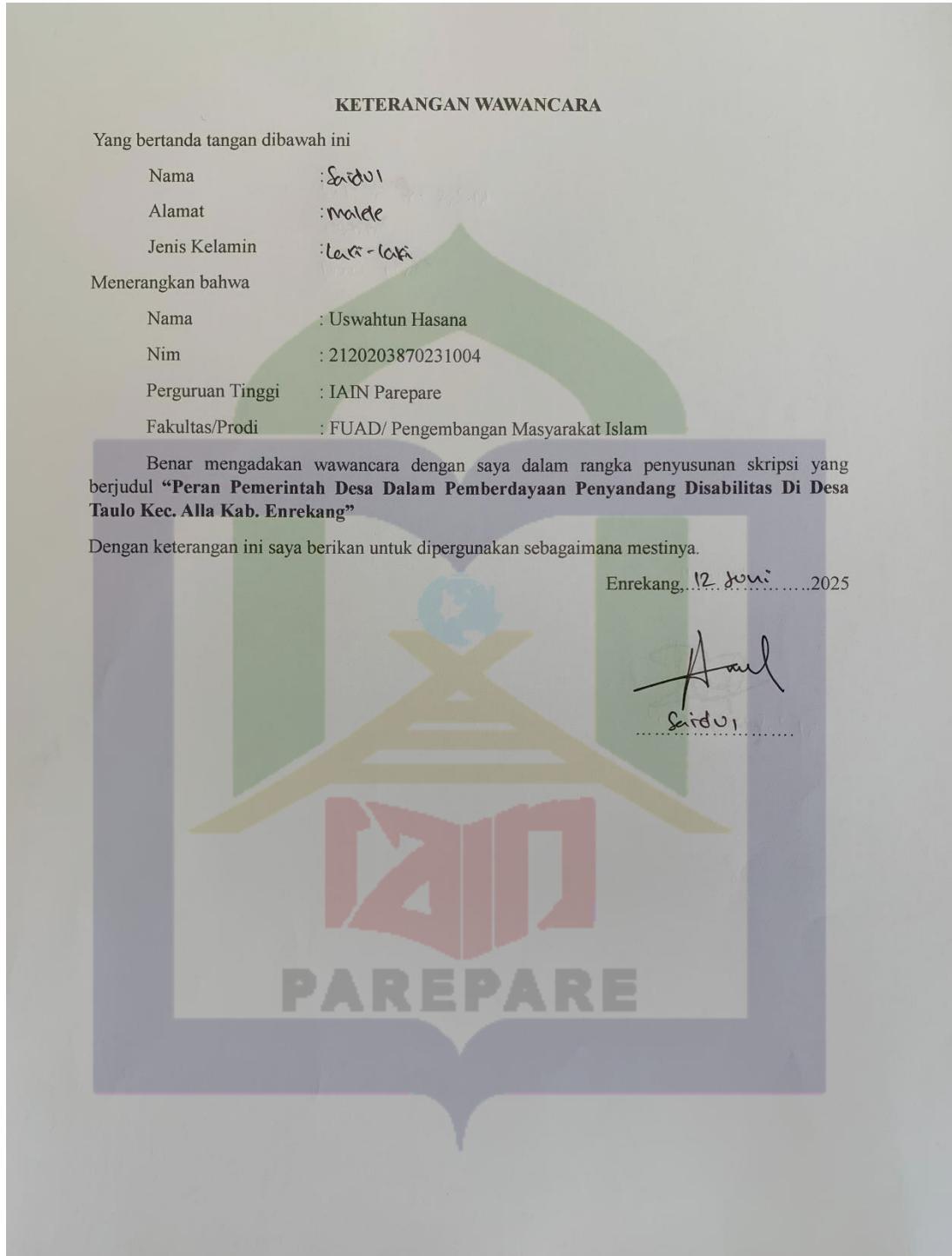

Muh. Yusran, S.E.

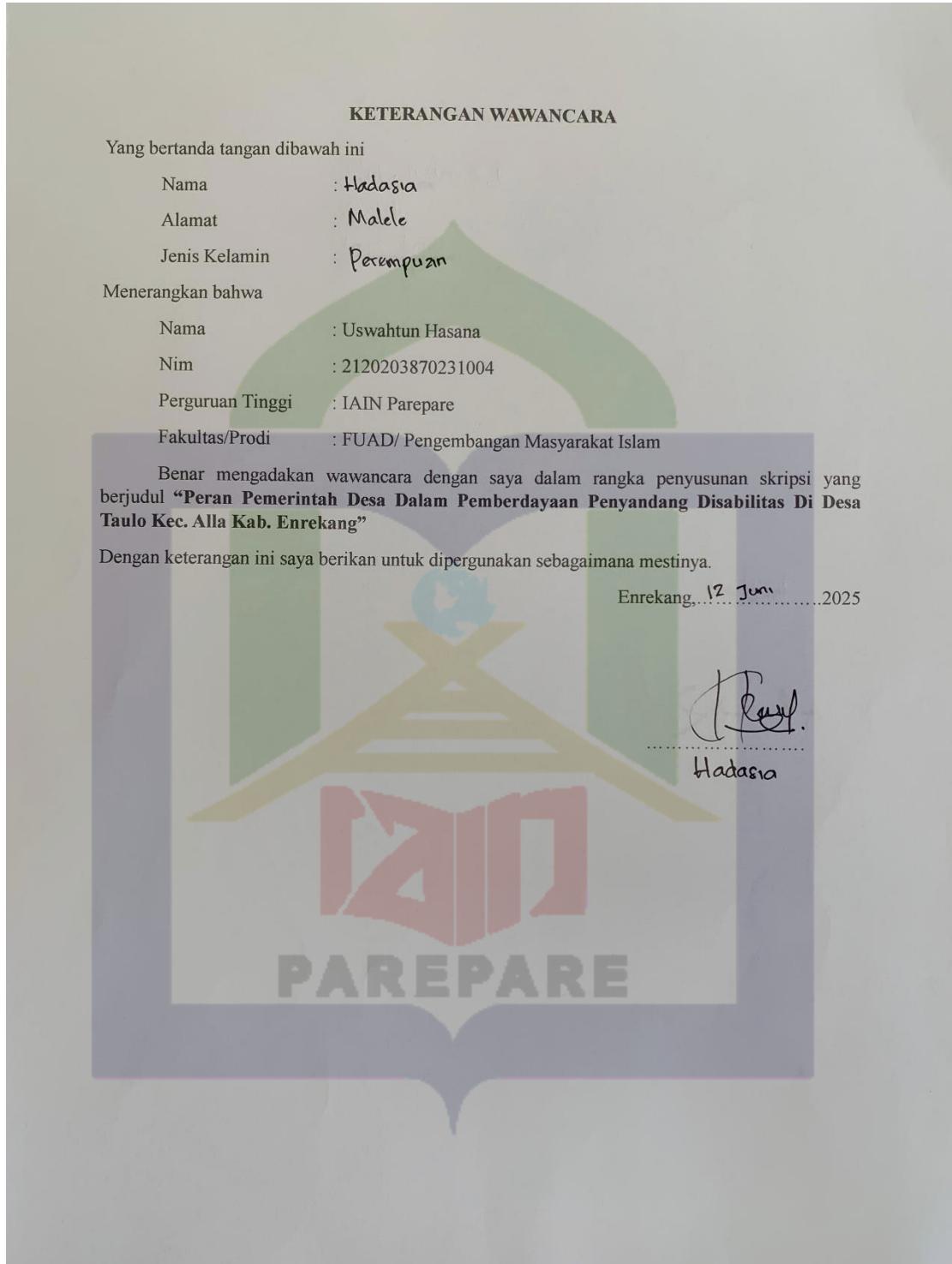


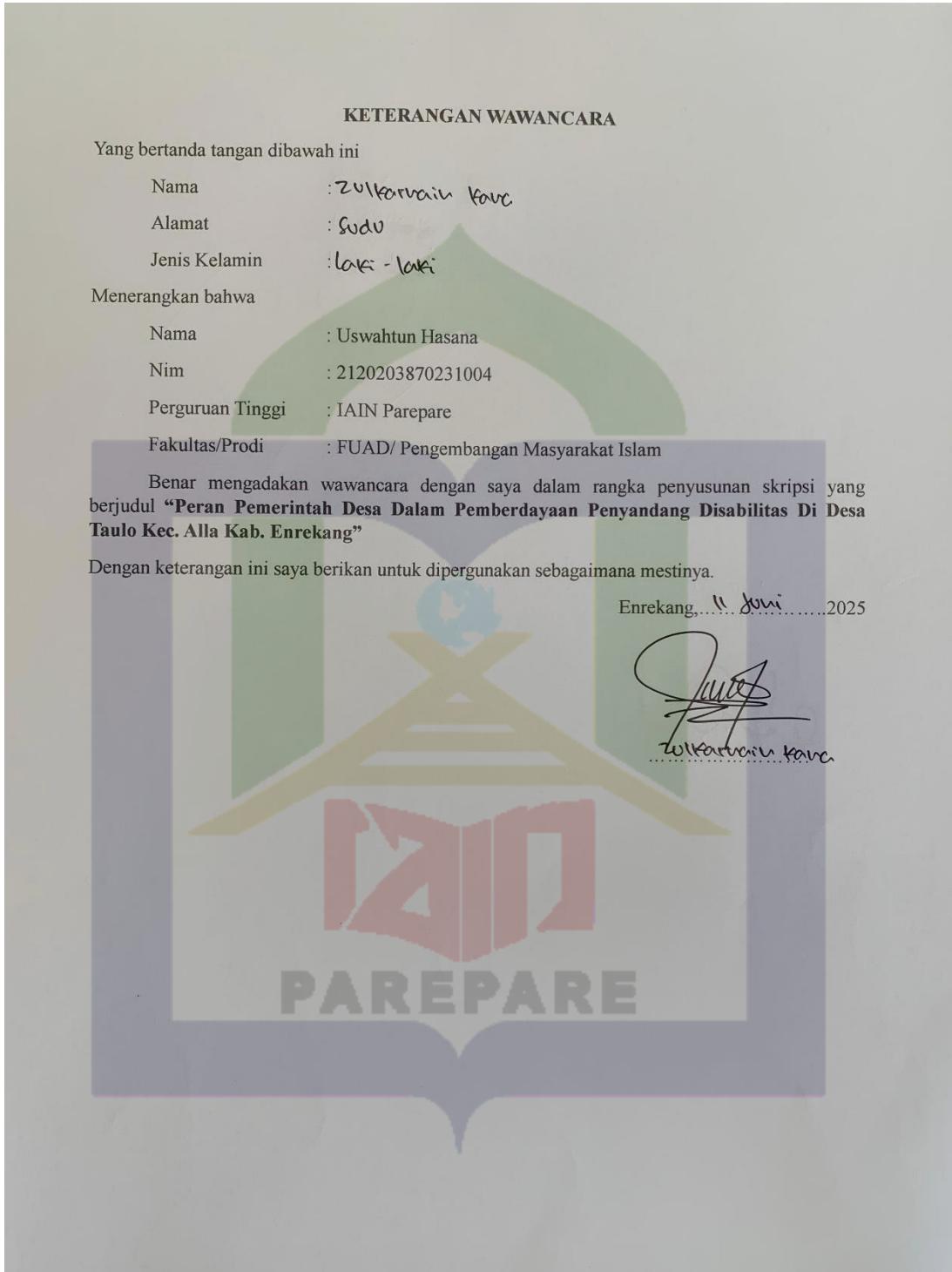


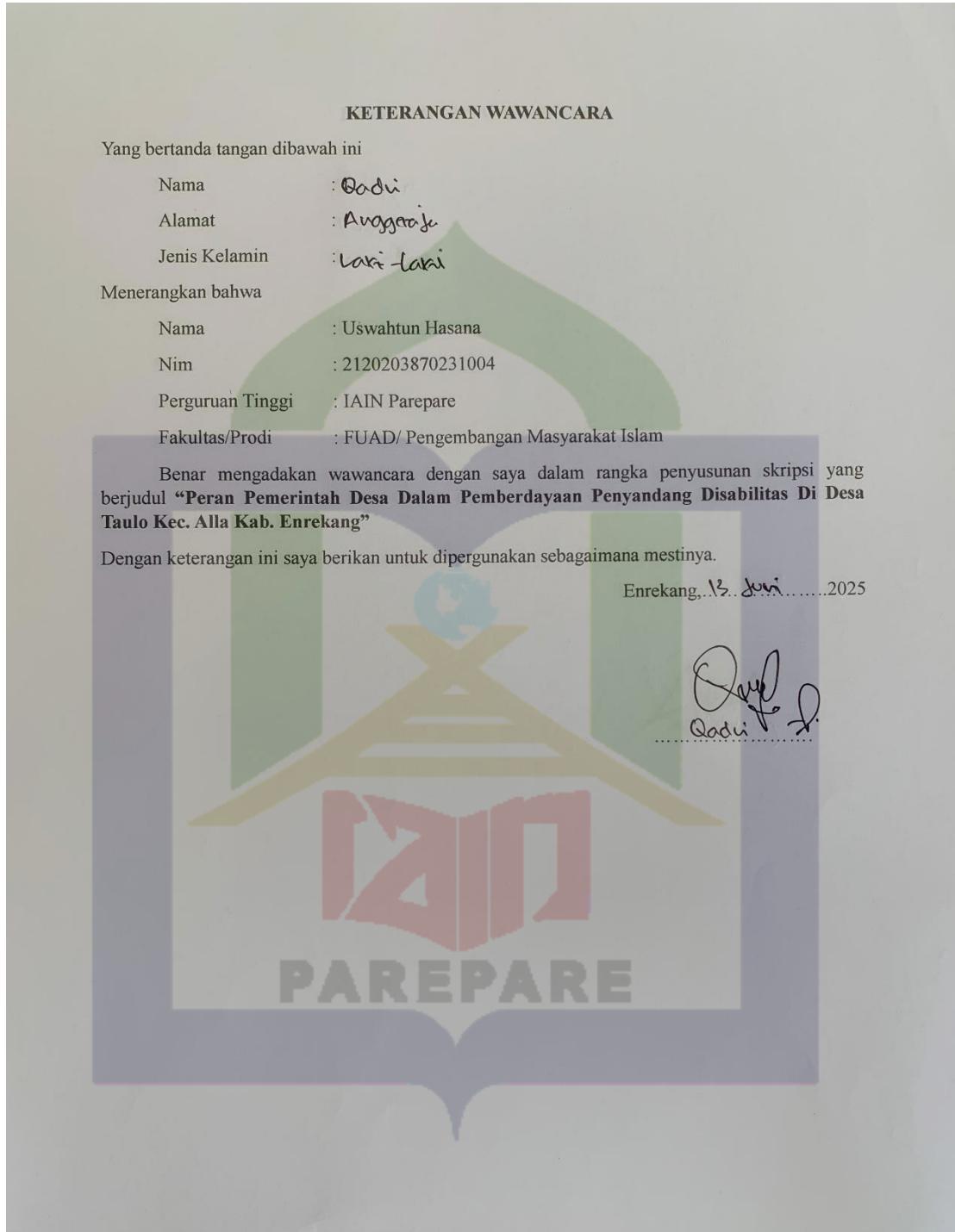


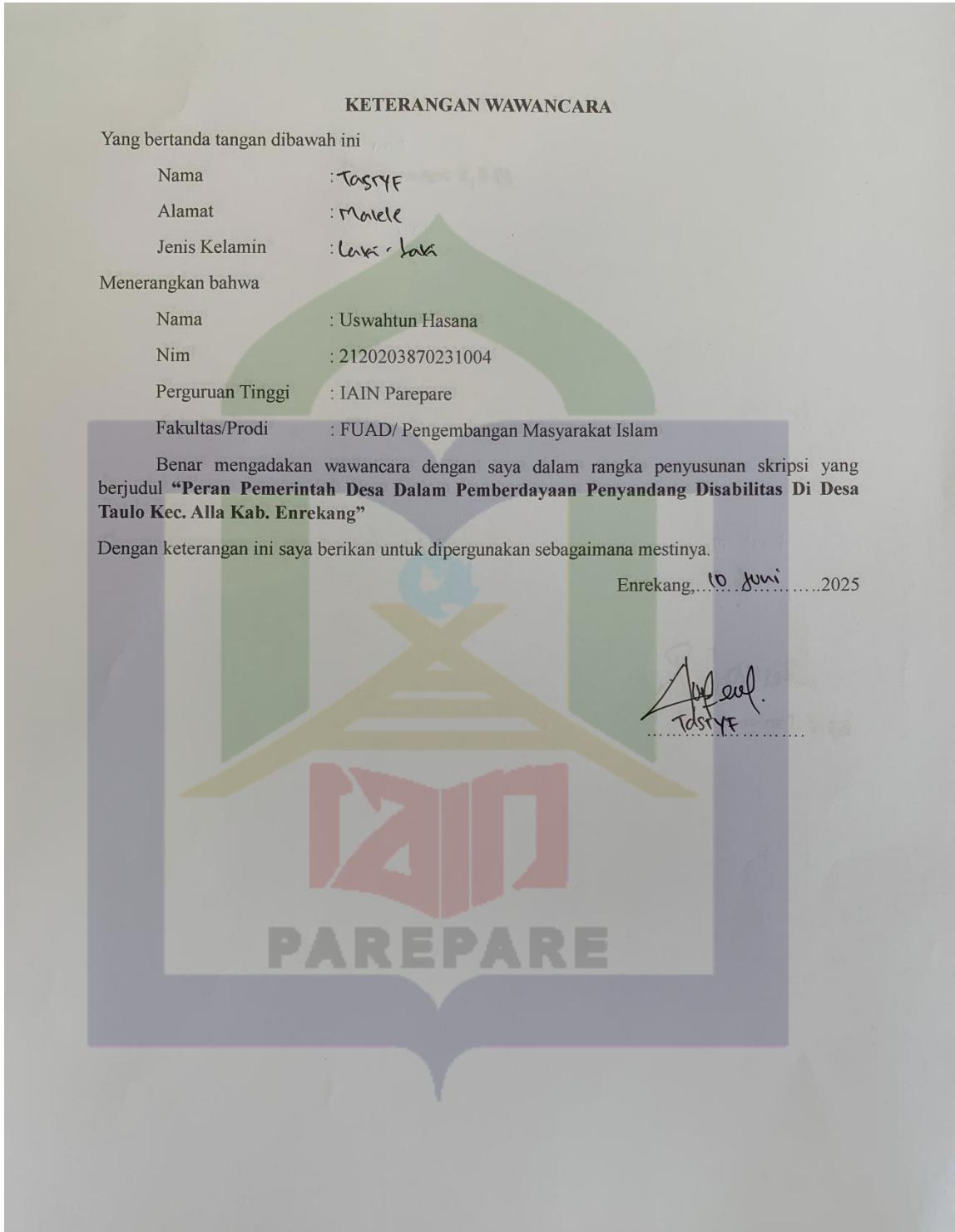


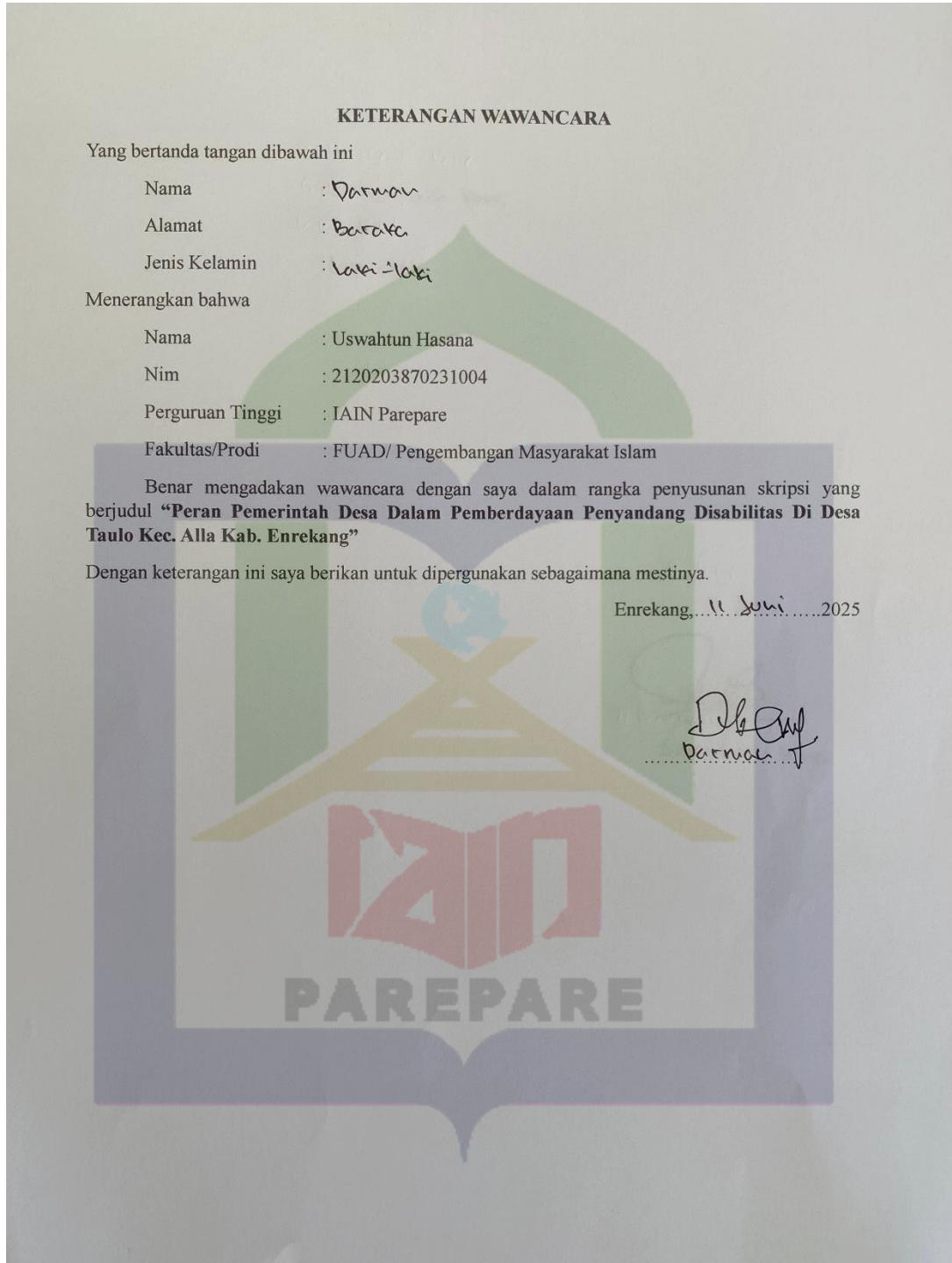












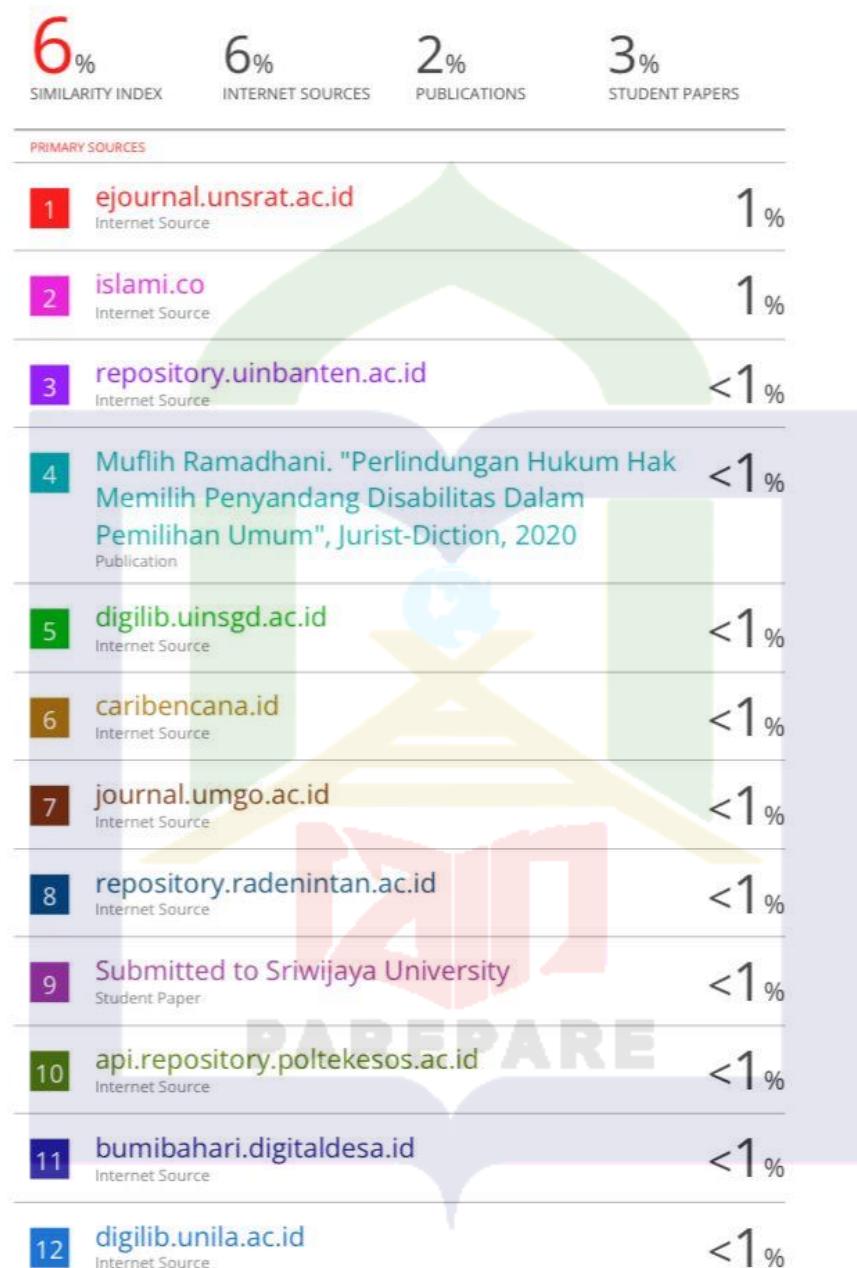
Lampiran 7. Dokumntasi Wawancara







Lampiran 8. Turnitin



BIODATA PENULIS



Uswahtun Hasana, biasa dipanggil Usrah dan lahir di Kabupaten Enrekang pada tanggal 07 September 2002. Penulis merupakan anak ke-tiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Tasryf dan Ibu Hadasia. Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) 132 Malele dan menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTsN Alla pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Enrekang dan selesai pada tahun 2021. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan dengan jurusan

Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri (IAINs) Parepare pada tahun 2021. Selama menjalani perkuliahan, penulis pernah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di BBPPKS Makassar sebagai muara dari semua kegiatan teori dan praktik bagi mahasiswa. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) DI Desa Tammajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis merupakan salah satu awardee BSI Scholarship Inspirasi Batch 3. Selain kuliah, penulis juga aktif mengikuti Organisasi internal kampus yakni Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) Pengembangan Masyarakat Islam dan menjabat sebagai Ketua Umum dan Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis, mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaiannya skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Tauло Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang”** pada fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah dengan pembimbing Yaitu Afidatul Asmar, M.Sos.